

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
(Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**ABDUL WAHID
2019.MM.1.2233**

**PROGRAM PASCA SARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN
TEKNOLOGI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
PROVINSI SULAWESI BARAT
(Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Manajemen**



Oleh:

**ABDUL WAHID
2019.MM.1.2233**

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
KONSENTRASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH**

**PROGRAM PASCA SARJANA
STIE NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN TESIS

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN
PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI BARAT
(Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Provinsi Sulawesi Barat)**

Oleh:

**ABDUL WAHID
2019MM12233**

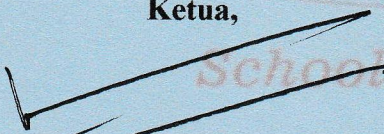
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 31 Mei 2021
Dinyatakan telah memenuhi syarat

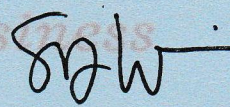
Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Ketua,

Anggota,



Dr. Maryadi, S.E., M.M.

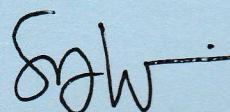

Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

Mengetahui:

Direktur PPS STIE Nobel Indonesia,

Ketua Prodi Magister Manajemen,


Dr. Maryadi, S.E., M.M.


Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

HALAMAN IDENTITAS**MAHASISWA, PEMBIMBING DAN PENGUJI****JUDUL TESIS:**

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN PROVINSI SULAWESI BARAT (Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

IDENTITAS MAHASISWA

Nama Mahasiswa : Abdul Wahid
NIM : 2019MM12233
Program Studi : Magister Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Daerah

KOMISI PEMBIMBING

Ketua : Dr. Maryadi, S.E., M.M.
Anggota : Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Dr. Syafruddin Kitta, S.T., M.Si.
Dosen Penguji 2 : Dr. Hari S.IP., SH., M.Si., MH.
Tanggal Ujian : 31 Mei 2021
SK Penguji Nomor : 032/SK/PPS/STIE-NI/IV/2021

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam Naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER MANAJEMEN) ini dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

2021

Mahasiswa,



Abdul Wahid
2019MM12233

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur dihanturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Tesis dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)”** dapat diselesaikan. Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen pada Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan dan pembahasannya juga menyadari bahwa penulisan ini tidak akan tersusun tanpa bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. **Dr. H. Mashur Razak, S.E., M.M.** selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar.
2. **Dr. Maryadi, S.E., M.M.** selaku Direktur Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
3. **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.** selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana STIE Nobel Indonesia Makassar.
4. **Dr. Maryadi, S.E., M.M.** selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan **Dr. Sylvia Sjarlis, S.E., M.Si., Ak., C.A.** selaku anggota Komisi Pembimbing yang

telah bersedia membimbing, menyumbangkan masukan dan saran serta kritikan untuk kesempurnaan tesis ini.

5. Keluarga yang tercinta yang senantiasa memberikan dukungan do'a, nasehat, dan motivasi yang diberikan selama kuliah sampai penulisan tesis ini sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Bapak/Ibu Dosen, serta staf Program Pascasarjana Program Studi Manajemen STIE Nobel Indonesia Makassar, atas bantuan yang telah di berikan selama ini, kiranya akan menjadi bekal hidup dalam mengabdikan ilmu saya dikemudian hari.
7. Teman sejawat mahasiswa prodi Magister Manajemen PPs STIE Nobel Indonesia Makassar atas bantuan dan kerja samanya selama ini. Dan semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga senantiasa mendapatkan kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini dengan harapan, semoga tesis ini bermanfaat bagi pengambilan kebijakan di bidang manajemen dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian selanjutnya. Amin.

Makassar, 2021

Penulis

Abdul Wahid
2019MM12233

ABSTRAK

Abdul Wahid. 2021. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), dibimbing oleh Maryadi dan Sylvia Sjarlis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (2) pengaruh sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern secara simultan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (3) variabel yang berpengaruh dominan kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian survey. Penelitian dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Juli 2021 hingga bulan Agustus 2021. Populasi penelitian adalah semua pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan kriteria yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan yang berjumlah 54 orang.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) secara parsial variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dengan $t_{hitung} = 3,076, 2,395 \text{ dan } 3,895 > t_{tabel} = 2,007$, (2) secara simultan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dimana $F_{hitung} = 23,471 > F_{tabel} = 2,79$ (3) variabel pengendalian intern memiliki pengaruh paling dominan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dilihat dari nilai determinasi yang paling besar yaitu 0,388 atau 38,8%.

Kata kunci: *Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi, Pengendalian Intern, Kualitas Laporan Keuangan.*



ABSTRACT

Abdul Wahid. 2021. *The Effect of the Application of Regional Financial Management Information Systems, Utilization of Technology and Internal Controls on the Quality of Financial Reports for the Government of West Sulawesi Province (Empirical Study on SKPD of the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province), supervised by Maryadi and Sylvia Sjarlis.*

This study aims to determine and analyze (1) the effect of regional financial management information systems, technology utilization and internal control partially on the quality of the West Sulawesi Provincial Government's financial reports (2) the effect of regional financial management information systems, technology utilization and internal control simultaneously towards the quality of the financial statements of the West Sulawesi Provincial Government (3) the most dominant variable affects the quality of the West Sulawesi provincial government's financial reports.

This approach uses survey research conducted at the Regional Finance and Revenue Management Agency of West Sulawesi Province from July 2021 to August 2021. The research population is all employees of the Regional Revenue and Finance Management Agency of West Sulawesi Province. Sampling was carried out by purposive sampling method with the criteria involved in preparing financial statements totalling 54 people.

The test results show that (1) partially the regional financial management information system variables, the use of technology and internal control have a significant positive effect on the quality of the West Sulawesi Provincial Government financial reports with $t_{count} = 3.076, 2.395, \text{ and } 3.895 > t_{table} = 2.007$ (2) simultaneously variable regional financial management information system, technology utilization and internal control have a significant positive effect on the quality of the financial statements of the West Sulawesi Provincial Government where $F_{count} = 23,471 > F_{table} = 2.79$ (3) the internal control variable has the most dominant influence on the quality of the financial statements of the West Sulawesi Provincial Government seen from the value of the most significant determination that is 0.388 or 38.8%.

Keywords: *Regional Financial Management Information System, Utilization of Technology, Internal Control, Quality of Financial Reports.*



DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN IDENTITAS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).....	12
2.3 Pemanfaatan Teknologi.....	16
2.4 Pengendalian Intern.....	18
2.5 Kualitas Laporan Keuangan	29
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	
3.1 Kerangka Konseptual	37
3.2 Hipotesis Penelitian.....	42
3.3 Definisi Konseptual.....	42
BAB IV METODE PENELITIAN	
4.1 Desain Penelitian.....	47
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	47
4.3 Populasi dan Sampel	47
4.4 Skala dan Pengukuran Data	48
4.5 Pengujian Instrumen Penelitian.....	49
4.5.1 Uji Validitas Instrumen (<i>test of validity</i>)	50

4.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen (<i>Test Of Reliability</i>).....	50
4.6 Metode Pengumpulan Data	51
4.7 Teknik Analisa Data.....	51

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian	55
5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	55
5.1.2 Deskripsi Data	59
5.1.3 Deskripsi Responden	60
5.1.4 Deskripsi Indeks Jawaban Responden.....	62
5.1.5 Analisis Statistik Deskriptif.....	67
5.1.6 Pengujian Instrumen Penelitian	69
5.1.7 Uji Asumsi Klasik.....	74
5.1.8 Persamaan Regresi Linear Berganda	80
5.1.9 Pengujian Hipotesis	82
5.2 Pembahasan Hasil Penelitian	87
5.2.1 Uji T (Parsial)	88
5.2.2 Uji Statistik F (Simultan).....	95
5.2.3 Variabel Dominan.....	96

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan.....	98
6.2 Saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian	48
Tabel 5.1 Rincian Pengembalian Kuesioner	59
Tabel 5.2 Jenis Kelamin Responden	60
Tabel 5.3 Tingkat Pendidikan Responden	61
Tabel 5.4 Golongan Responden	61
Tabel 5.5 Masa Kerja Responden	62
Tabel 5.6 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	64
Tabel 5.7 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi	65
Tabel 5.8 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengendalian Intern.	66
Tabel 5.9 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	67
Tabel 5.10 Statistik Deskriptif	68
Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1).....	70
Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi (X2)	71
Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X3)	72
Tabel 5.14 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)	73
Tabel 5.15 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	74
Tabel 5.16 Uji Normalitas.....	76
Tabel 5.17 Uji Multikolinearitas	77
Tabel 5.18 Uji <i>Gelsjer</i>	79
Tabel 5.19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	80
Tabel 5.20 Uji Koefisien Determinasi (R ²)	82
Tabel 5.21 Uji Parsial (Uji T)	84
Tabel 5.22 Uji Simultan (Uji F)	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skema Kerangka Berfikir.....	41
Gambar 5.1 Struktur Organisasi BPKPD Prov. Sulbar.....	58
Gambar 5.2 Grafik histogram Uji Normalitas	75
Gambar 5.3 <i>Normal Probability Plot</i>	75
Gambar 5.4 Grafik Scatterplot	78

DAFTAR LAMPIRAN**LAMPIRAN 1 : KUESIONER PENELITIAN****LAMPIRAN 2 : TABULASI DATA****LAMPIRAN 3 : HASIL ANALISIS DATA**

1. DESKRIPSI RESPONDEN
2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF
3. UJI INSTRUMEN PENELITIAN
 - A. UJI VALIDITAS
 - B. UJI RELIABILITAS
4. UJI ASUMSI KLASIK
 - A. UJI NORMALITAS
 - B. UJI MULTIKOLINIERITAS
 - C. UJI HETEROSKEDASTISITAS
5. ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA
 - A. UJI SIGNIFIKANSI PARSIAL (UJI T)
 - B. UJI SIGNIFIKAN SIMULTAN (UJI F)
 - C. UJI KOEFISIEN DETERMINASI (R^2)

LAMPIRAN 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi entitas (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Di Indonesia pelaporan pengelolaan keuangan daerah telah banyak mengalami perbaikan sejalan dengan reformasi manajemen keuangan pemerintah, hal ini bertujuan untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Reformasi manajemen keuangan pemerintah ditandai dengan adanya peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara beserta peraturan-peraturan turunannya yang juga telah banyak mengalami revisi dan penyempurnaan. Dalam perkembangan masyarakat yang maju utamanya di era keterbukaan, teknologi dan informasi ini pemerintah khususnya dituntut untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik secara transparansi.

Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. laporan keuangan yang berkualitas harus sesuai dengan karakteristik kualitatif, informasi keuangan yang dihasilkan sangat penting bagi pemerintah agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan, andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan (*comparability*).

Dalam rangka mengimplementasikan perundang-undangan bidang keuangan negara terutama pada instansi pemerintah di daerah telah dikeluarkan aturan pelaksanaan salah satunya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005: Pasal 1 Ayat 15 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Saat ini untuk pelaporan pertanggung jawaban keuangan baik pemerintah pusat maupun daerah telah menggunakan suatu sistem. Peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur tentang pelaporan pengelolaan keuangan daerah telah sedikit membawa perubahan dalam akuntansi pemerintahan. Instansi pemerintahan pusat maupun daerah saat ini telah melakukan perubahan tata pembukuan dari sistem pembukuan menjadi sistem akuntansi dalam menyusun laporan keuangannya.

Dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas, tentunya instansi memerlukan teknologi informasi. Dengan aplikasi, khususnya instansi pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan

daerah secara terintegrasi dan akurat, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. Aplikasi yang diperlukan yaitu berupa Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. (Ismi, 2017).

Sistem informasi keuangan daerah merupakan salah satu tugas pemerintah daerah dalam menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah kepada pemerintah pusat. Sehingga pemerintah dapat memberikan informasi keuangan daerah untuk masyarakat publik. Dengan menerapkan SIPKD, pemerintah dapat menyusun dokumen seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lebih cepat dan mengurangi tingkat kesalahan pengetikan jika dilakukan secara manual. SIPKD merupakan salah satu aplikasi yang digunakan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Dikarenakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dibuat untuk membantu pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaan keuangan daerah agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik diperlukan juga sistem pengendalian intern yang lebih baik. Pengendalian intern digunakan untuk mengantisipasi adanya pencurian, penggelapan keuangan oleh pegawai, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Sistem pengendalian merupakan proses kegiatan yang dilakukan didalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya.

Untuk mencapai laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah daerah menerapkan sistem pengendalian internal. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat menjadi alat untuk antisipasi dan deteksi dini (built in control) terhadap ketidaksesuaian atau celah pelanggaran yang mungkin timbul dalam organisasi. Ketika internal control sistem yang dijabarkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “under control”. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah, pengendalian internal yang efektif dalam suatu pemerintahan dapat menciptakan keseluruhan suatu proses kegiatan yang baik, sehingga hal tersebut dapat menentukan baik atau buruknya kinerja pada suatu organisasi. Jika pengendalian internal pada suatu

organisasi lemah maka akan membuka peluang bagi para pegawai untuk melakukan kecurangan. Sehingga kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan dengan baik serta dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Abdul Wahid (2021), menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin baik Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Variabel Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian semakin baik Sistem Pengendalian Intern maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang berarti terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (Studi Empiris pada SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah peneliti uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat?
3. Faktor apakah yang dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang dominan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Dapat memberikan masukan mengenai pengaruh penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan, guna mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan bersamaan dengan tercapainya sasaran instansi.
2. Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Made Ayu Darmayani (2014). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), dan Pengendalian Intern Terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng Penelitian Darmayani tujuan penelitian ini untuk mengetahui secara empiris pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan SIPKD, dan pengendalian intern terhadap nilai laporan keuangan. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian hipotesis adalah sebagai berikut: Kualitas SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, Penerapan SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng, dan Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Laporan Keuangan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Hasil uji secara simultan dapat disimpulkan Kualitas SDM, Penerapan SIPKD, dan pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai laporan keuangan. Persamaan penelitian ini adalah menggunakan variabel X yang sama yakni penerapan SIPKD dan Pengendalian Intern. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel X kualitas SDM dan variabel Y nilai laporan keuangan bagian keuangan.

2. Penelitian Sari (2018). Pengaruh SIPKD, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan penelitian ini untuk secara empiris mengetahui pengaruh SIPKD, sistem pengendalian intern, standar akuntansi pemerintah dan Pemanfaatan teknologi terhadap kualitas laporan keuangan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Artinya semakin baik Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Dengan demikian semakin baik Sistem Pengendalian Intern maka akan semakin baik Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel Standar Akuntansi Pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang berarti terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Pekanbaru. Koefisien determinasi yang diperoleh adalah sebesar $Adj. R^2 = 0,691$. Hal ini berarti kualitas laporan keuangan

pemerintah Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh variabel SIPKD, SPI, SAP dan pemanfaatan teknologi informasi sebesar 69,10%. Sementara sekitar 40,90% dipengaruhi oleh variabel lain. Persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan beberapa variabel X yang sama yakni SIPKD, Pengendalian Intern, dan pemanfaatan teknologi dan penggunaan variabel Y yang sama terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan beberapa variabel X yakni standar akuntansi pemerintah.

3. Penelitian Putri (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal Dan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan baik pengaruh secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan bersifat kausalitas. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis serta didahului dengan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kualitas sumber daya manusia, pemahaman regulasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial kualitas sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan pemahaman regulasi standar akuntansi

pemerintahan berbasis akrual, sistem pengendalian internal dan sistem manajemen keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan pengujian kontribusi secara simultan oleh variabel-variabel bebas (R^2) sebesar 95,6%. Persamaan dengan penelitian terletak pada penggunaan beberapa variabel X yakni kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal, serta variabel Y adalah kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan terletak pada penggunaan beberapa variabel X berikut pemahaman regulasi standar akuntansi berbasis akrual dan penerapan sistem manajemen keuangan daerah.

4. Pradono (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari laporan pemerintah daerah keuangan dan masalah/kendala yang dihadapi oleh SKPD di penyusunan laporan keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil isian kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti maupun tanya jawab secara langsung dengan beberapa responden bagian akuntansi/keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran PKK - SPKPD tidak berpengaruh signifikan. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan beberapa variabel X yang sama yakni pemanfaatan teknologi dan sistem pengendalian intern

terhadap kualitas laporan keuangan (y). Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan beberapa variabel X yakni rekonsiliasi dan peran PKK - SPKPD.

5. Setyowati (2016). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari penyebaran kuesioner kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang bagian akuntansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran teknologi informasi (TI) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, peran internal audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dengan penelitian ini menggunakan variabel X peran teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini terletak pada penggunaan variabel X kompetensi sumber daya manusia dan internal audit.

2.2 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Pemerintah memerlukan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah. Sistem tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2007. Atas dasar tersebut pemerintah

daerah mengembangkan sebuah sistem informasi keuangan yang memiliki kekuatan fitur bukan hanya dari sisi kelengkapan fungsionalitasnya saja, namun juga memiliki kekuatan dalam proses integrasi dengan sistem-sistem lainnya yang terkait.

Aplikasi SIPKD merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam proses-proses yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat SKPD. Adapun fungsi aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Maulana Yusuf (2016) adalah sebagai berikut:

1. Membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah (penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.
2. Menyusun laporan keuangan lebih efisien dan akurat
3. Menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya
4. Menyajikan informasi yang akurat.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sebagai sistem informasi, karena SIPKD merupakan sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah (Yani, 2009).

Elemen-elemen SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), ada 2 (dua) alternative yang dapat dipilih dalam menghasilkan laporan keuangan melalui aplikasi SIPKD yaitu:

1. Laporan keuangan lengkap

Laporan keuangan lengkap antara lain menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Buku jurnal SKPD
- b. Buku jurnal PPKD
- c. Buku Besar Rekening Anggaran
- d. Buku Besar Rekening Neraca
- e. Laporan Realisasi Anggaran
- f. Laporan Arus Kas

g. Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi

2. Laporan keuangan standar

Laporan keuangan standard antara lain menghasilkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Arus Kas
- c. Neraca SKPD dan Neraca Konsolidasi.

Sementara dokumen-dokumen pendukung laporan keuangan berupa dokumen SPJ, BKU Bendahara dan Buku Jurnal serta Buku Besar dapat dilengkapi secara manual (Yusup, 2016). Dalam penerapan SIPKD opini BPK WTP merupakan penilaian tertinggi yang diberikan karena menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah disajikan secara wajar, tidak terdapat kesalahan yang material, dan sesuai standard (Sari, 2018). Hal ini mengindikasikan suatu kemajuan akan kinerja instansi di pemerintah daerah karena menunjukkan bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Perundang- undangan yang berlaku serta disajikan secara andal dan tepat waktu.

Menurut Yusup (2016) Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat diukur menggunakan indikator berikut:

1. Keamanan data
2. Kecepatan dan ketepatan waktu
3. Ketelitian
4. Variasi laporan atau output dan

5. Relevansi sistem.

2.3 Pemanfaatan Teknologi

Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi maupun predikatnya sebagai mesin multiguna, *multiprocessing*. Pemanfaatan teknologi informasi juga akan mengurangi kesalahan yang terjadi. Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi sektor publik utamanya pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi pasti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi (Sari, 2018).

Teknologi informasi sangat berperan terhadap perkembangan akuntansi utamanya membantu dalam pembuatan laporan keuangan yang lebih mudah, efektif, efisien dan akurat. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan, mengendalikan dan mengoperasikan bisnis.(Krsimiaji, 2015). Pada dasarnya, sebuah sistem informasi akuntansi dapat menambah nilai bagi bisnis dengan cara sebagai berikut:

1. Dapat memperbaiki produk atau jasa dengan meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, atau menambah atribut yang diinginkan konsumen

2. Dapat meningkatkan efisiensi
3. Dapat memberikan informasi yang tepat waktu dan dapat dipercaya untuk memperbaiki pembuatan keputusan
4. Dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan
5. Dapat memperbaiki komunikasi
6. Dapat memperbaiki penggunaan pengetahuan.

Dalam pemanfaatan teknologi pada sistem informasi akuntansi perlu memperhatikan beberapa komponen pendukung, yaitu (TM Books, 2017)

1. User yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya
4. Software yang digunakan untuk memproses data
5. Infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari komputer, peripheral device, dan perangkat jaringan
6. Pengendalian intern untuk menjaga keamanan data sistem informasi akuntansi.

Melihat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi, maka menurut Ardana (2016) indikator yang digunakan untuk mengkaji pemanfaatan teknologi pada instansi pemerintah daerah yaitu:

1. Ketepatan waktu hasil output.
2. Alat pendukung sistem.
3. Ketersediaan hardware dan software.

4. Kecepatan dan keakuratan output.
5. Dapat memperbaiki output.

2.4 Pengendalian Intern

Pengendalian intern (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2015). Tujuan ketaatan (*compliance*) dari pengendalian intern menekankan pada kemampuan pengendalian tersebut untuk memastikan bahwa setiap peraturan, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan baik oleh pihak eksternal (pemerintah, pemegang saham) maupun oleh pihak intern (manajemen), ditaati dan diimplementasikan oleh setiap orang/unit dalam suatu entitas organisasi. Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang dalam organisasi (Sujarweni, 2015).

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal. Dengan diadakan pelaksanaan pengendalian internal yang tepat pada instansi pemerintah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap kinerja dan penggunaan anggaran. Sistem pengendalian internal ini terdiri dari kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaran tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dalam Mamujaja (2016) adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan
2. Penyelenggaraan Pemerintah Negara
3. Keandalan Pelaporan Keuangan
4. Pengamanan Aset Negara
5. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan

Penerapan Unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. SPIP terdiri dari beberapa unsur, penerapan unsur SPIP yang dilaksanakan harus menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. Terdapat 5 unsur dalam SPIP menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 diantaranya lingkungan pengendalian, suasana organisasi yang mempengaruhi kesadaran penguasaan dari seluruh pegawainya, penilaian risiko, proses mengidentifikasi dan menilai risiko – risiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan kegiatan pengendalian, kebijakan dan prosedur yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan telah dilaksanakan informasi dan komunikasi, dua elemen yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya.

Pengendalian intern dalam pelaksanaannya juga harus diuji keefektifitasnya. Penentuan apakah pengendalian telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat serta apakah pelaksana sudah memiliki

kewenangan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengendalian tersebut secara efektif merupakan tujuan dari dilaksanakannya pengujian pengendalian intern. Seperti yang kita ketahui, jika pengendalian internal dihasilkan andal, asser milik negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan maka akan tercipta tata kelola pemerintah yang baik (Ristanti dkk, 2014)

Menurut (COSO, 2013) ada lima komponen pengendalian intern adalah sebagai berikut.

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Merupakan susunan dari standar, proses dan struktur yang menyediakan dasar untuk terlaksananya pengendalian internal dalam organisasi. Lingkungan pengendalian mencakup standar, proses, dan struktur yang menjadi landasan terselenggaranya pengendalian internal di dalam organisasi secara menyeluruh. Lingkungan pengendalian tercermin dari suasana dan kesan yang diciptakan dewan komisaris dan manajemen puncak mengenai pentingnya pengendalian internal dan standar perilaku yang diharapkan. Manajemen mempertegas harapan atau ekspektasi itu pada berbagai tingkatan organisasi. Sub-komponen lingkungan pengendalian mencakup integritas dan nilai etika yang dianut organisasi; parameter-parameter yang menjadikan dewan komisaris mampu melaksanakan tanggung jawab tata kelola; struktur organisasi serta pembagian wewenang dan tanggung jawab; proses untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; serta kejelasan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan

untuk mendorong akuntabilitas kinerja. Lingkungan pengendalian berdampak luas terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang (iterative) untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko terkait pencapaian tujuan. COSO 2013 merumuskan definisi risiko sebagai kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi dan berdampak merugikan bagi pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi organisasi bisa bersifat internal (berasal dari dalam) ataupun eksternal (bersumber dari luar). Risiko yang teridentifikasi akan dibandingkan dengan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Penilaian risiko menjadi dasar bagaimana risiko organisasi akan dikelola. Salah satu prakondisi bagi penilaian risiko adalah penetapan tujuan yang saling terkait pada berbagai tingkat organisasi. Manajemen harus menetapkan tujuan dalam katagori operasi, pelaporan, dan kepatuhan dengan jelas sehingga risiko-risiko terkait bisa diidentifikasi dan dianalisa. Manajemen juga harus mempertimbangkan kesesuaian tujuan dengan organisasi. Penilaian risiko mengharuskan manajemen untuk memperhatikan dampak perubahan lingkungan eksternal serta perubahan model bisnis organisasi itu sendiri yang berpotensi mengakibatkan ketidakefektifan pengendalian intern yang ada.

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Kegiatan pengendalian mencakup tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu memastikan dilaksanakan arahan manajemen dalam rangka meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan. Kegiatan

pengendalian dilaksanakan pada semua tingkat organisasi, pada berbagai tahap proses bisnis, dan pada konteks lingkungan teknologi. Kegiatan pengendalian ada yang bersifat preventif atau detektif dan ada yang bersifat manual atau otomatis. Contoh kegiatan pengendalian adalah otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi, dan review kinerja. Dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian, biasanya melekat konsep pemisahan fungsi (*segregation of duties*). Jika pemisah fungsi tersebut dianggap tidak praktis, manajemen harus memilih dan mengembangkan alternatif kegiatan pengendalian sebagai kompensasinya.

4. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian intern dalam mendukung pencapaian tujuan. . Manajemen harus memperoleh, menghasilkan, dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas, baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lainnya berfungsi sebagaimana mestinya. Komunikasi sebagaimana yang dimaksud dalam kerangka pengendalian internal COSO adalah proses iteratif dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, dan menyediakan informasi. Komunikasi internal harus menjadi sarana diseminasi informasi di dalam organisasi, baik dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maupun lintas fungsi.

5. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Komponen ini merupakan satu-satunya komponen yang berubah nama. Sebelumnya komponen ini hanya disebut pemantau (*monitoring*). Perubahan ini dimaksudkan untuk memperluas persepsi pemantauan sebagai rangkaian aktivitas

yang dilakukan sendiri dan juga sebagai bagian dari masing-masing empat komponen pengendalian intern lainnya. Kegiatan pemantauan mencakup evaluasi berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau kombinasi dari keduanya yang digunakan untuk memastikan masing-masing komponen pengendalian intern ada dan berfungsi sebagaimana mestinya. Evaluasi berkelanjutan dibangun di dalam proses bisnis pada tingkat yang berbeda-beda guna menyajikan informasi tepat waktu. Evaluasi terpisah dilakukan secara periodic, bervariasi lingkup dan frekuensinya tergantung pada hasil penilaian risiko, efektivitas evaluasi berkelanjutan, dan pertimbangan manajemen lainnya.

Lebih lanjut (Sujarweni, 2015) menyatakan bahwa Struktur pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Struktur pengendalian intern memiliki tiga elemen, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian intern

Lingkungan pengendalian intern menjadi faktor utama yang menentukan tingkat keefektifan sistem pengendalian intern, terutama karena menyangkut kualitas kesadaran etis dan kompetensi oknum-oknum pimpinan dan orang-orang di dalam suatu entitas. Lingkungan pengendalian berkaitan dengan: (Ardana, 2016)

- a. Aspek integritas, nilai-nilai moral

Pelanggaran etika dan kurangnya integritas sering kali terjadi. Integritas dan nilai-nilai etika akan terjaga dengan baik apabila budaya perusahaan

yang terbutuk mendukungnya. Budaya perusahaan meliputi keyakinan umum, praktik dan perilaku para karyawannya.

- b. Komitmen terhadap kompetensi sumber daya manusia Sumber daya manusia yang kompeten dengan pengetahuan, pengalaman pelatihan, dan keahlian sangat penting untuk memfungsikan proses pengendalian intern.
- c. Filosofi manajemen dan gaya operasi
Pengendalian yang efektif diawali dari filosofi manajemen. Kesadaran akan pentingnya pengendalian dikomunikasikan ke bawahan melalui gaya operasi manajemen.
- d. Partisipasi komite audit
Audit merupakan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern.
- e. Struktur organisasi
Struktur organisasi memberikan kerangka bagi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan operasi. Aspek penting dari struktur organisasi adalah sentralisasi atau desentralisasi wewenang dalam organisasi dan bagaimana alokasi tanggung jawab tersebut mempengaruhi informasi yang diperlukan.
- f. Praktik dan kebijakan sumber daya manusia
Kebijakan sumber daya manusia meliputi pembagian tugas, penyeliaan (supervision), dan rotasi jabatan. Tanggung jawab atas tugas tertentu

dalam organisasi harus jelas dan tertulis dalam manual dan deskripsi pekerjaan.

- g. Perhatian serta pengarahan manajemen terhadap entitas dan karyawannya
Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan organisasi untuk mengurangi resiko dan mencapai tujuan pengendalian. Pengendalian aliran pekerjaan digunakan untuk mengendalikan suatu proses dari satu kejadian ke kejadian berikutnya. Pengendalian aliran pekerjaan berfokus pada tanggung jawab atas kejadian, urutan kejadian, dan aliran informasi antara kejadian.

2. Sistem akuntansi

Sistem akuntansi terdiri atas metoda dan catatan yang ditetapkan untuk mengidentifikasi, merangkai, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi perusahaan dan untuk memelihara akuntabilitas aktiva dan kewajiban yang terkait. Sistem akuntansi yang efektif memberikan dasar yang memadai untuk penetapan metoda dan catatan yang akan berfungsi sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat seluruh transaksi yang sah
- b. Menguraikan secara tepat waktu transaksi bisnis secara rinci sehingga memungkinkan klasifikasi transaksi secara tepat untuk pelaporan keuangan
- c. Mengukur nilai transaksi secara tepat sehingga memungkinkan pencatatan sebesar nilai moneterinya dalam laporan keuangan

- d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi sehingga memungkinkan pencatatan transaksi dalam periode akuntansi yang tepat
- e. Menyajikan secara tepat transaksi dan pengungkapan lain yang terkait dalam laporan keuangan.

3. Presedur pengendalian

Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditambahkan ke lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang layak bahwa tujuan khusus organisasi akan dicapai. Cakupan prosedur pengendalian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Otorisasi yang tepat terhadap transaksi dan aktivita
- b. Pemisahan tugas yang mengurangi peluang bagi seseorang untuk melakukan kesalahan dalam tugas rutinnnya, yaitu dengan menempatkan orang yang berbeda pada fungsi otorisasi transaksi, pencatatan transaksi, dan penjagaan aktiva
- c. Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan untuk membantu menjamin pencatatan transaksi secara tepat
- d. Penjagaan yang memadai terhadap akses dan penggunaan aktiva dan catatan
- e. Pengecekan independen terhadap kinerja dan penilaian yang tepat terhadap nilai yang tercatat.

Tujuan pengendalian intern menurut Ardana (2016) dilihat dari perspektif sistem informasi akuntansi, lebih ditujukan untuk membantu manajemen

melakukan pengamanan asset perusahaan, dan membina sistem informasi akuntansi yang andal dan dapat dipercaya. Untuk mencapai kedua tujuan ini maka pengendalian intern harus mengacu pada prinsi-prinsip pengendalian intern sebagai berikut:

1. Menetapkan tanggung jawab

Kontrol akan lebih efektif, jika setiap tugas tertentu ditetapkan satu pejabat khusus yang bertanggung jawab. Bila ada suayu tugas, atau pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh lebih dari satu orang tanpa kejelasan maka akan sering timbul suasana dan sikap saling lempr tanggung jawab dalam hal terjadinya kesalahan, kelalaian, atau penyimpangan dalam menjalankan tugas.

2. Pemisahan tugas

Prinsip pemisahan tugas merupakan salah satu prinsip penting dalam proses pengendalian intern. Prinsip ini diterapkan untuk dua hal:

- a. Beberapa orang ditugaskan secara terpisah untuk melaksanakan satu rangkaian kegiatan.
- b. Pemisahan fungsi pencatatan (akuntansi) dengan fungsi penyimpanan asset dan fungsi otorisasi transaksi.

Dalam prinsip pemisahan tugas, penting diperhatikan adanya pemisahan tiga fungsi dalam setiap organisaasi yaitu: fungsi akuntansi, fungsi penyimpanan dan fungsi otorisas (Ardana, 2016)

1. Prosedur dokumentasi

Dokumentasi berarti membuat berbagai kebijakan, prosedur, sistem, instruksi kerja, panduan, dan sejenisnya dalam bentuk deskripsi tertulis dalam bentuk

teks, gambar, atau bagan alir (*flowchart*). Dokumen berfungsi sebagai alat bukti transaksi yang sangat penting. Semua pencatatan akuntansi harus didasarkan atas dokumen pendukung yang sah, akurat, dan lengkap. Dokumentasi prosedur menjelaskan suatu mekanisme, proses, atau tahapan yang melewati beberapa orang, atau bagian tentang bagaimana dokumen transaksi disiapkan, dibuat, dan diperiksa oleh, serta didistribusikan ke berbagai pihak termasuk ke bagian akuntansi untuk proses pencatatan akuntansi.

2. Kendali secara fisik, elektronik, dan mekanik

Pengamanan asset perusahaan secara fisik dengan memanfaatkan teknologi peralatan baik yang bersifat mekanis maupun elektronis sudah semakin banyak digunakan oleh berbagai instansi pemerintah dan swasta.

3. Verifikasi intern yang bersifat independent

Sistem pengendalian intern yang efektif juga banyak memanfaatkan fungsi verifikasi yang dilakukan oleh petugas/pejabat intern yang bersifat independen atas suatu aktivitas atau operasi tertentu.

4. Alat kontrol lainnya

Beberapa sistem dan alat control lainnya yang juga banyak digunakan antara lain: rotasi atau mutasi petugas, mengecek referensi dari pihak mantan atasan karyawan yang bersangkutan pada saat melakukan proses rekrutmen, mengasuransikan petugas dalam bentuk asuransi perlindungan atas penyalahgunaan asset perusahaan dan sebagainya.

Variabel sistem pengendalian intern ini dapat diukur dengan indikator berikut:

1. Adanya *Standar Operating Procedure* (SOP)
2. Pemisahan wewenang
3. Dokumen dan catatan yang memadai
4. Tindakan disiplin atas pelanggaran
5. Pembatasan akses. Pembatasan akses. Pembatasan akses. Pembatasan akses.
Pembatasan akses.

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan suatu daftar financial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode; atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode. Susilowati, (2015) menyatakan Informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat tentunya bila memenuhi beberapa kriteria atau standart. Berikut beberapa kriteria kualitas informasi keuangan:

1. Relevan

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambilan suatu keputusan, maka informasi demikian tidak ada gunanya.

2. Dapat diuji

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subjektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia dalam

proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses pengukuran dan penyajian informasi tidak lagi berlandaskan realitas objektif semata.

3. Dapat dimengerti

Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti oleh pemakainya dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan pengertian para pemakai.

4. Netral

Laporan keuangan atau informasi keuangan itu diarahkan pada kepentingan umum dan tidak bergantung kepada kebutuhan pihak tertentu.

5. Tepat waktu

Informasi hendaknya diberikan sedini mungkin agar dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

6. Daya banding

Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dari perusahaan yang sama maupun dengan laporan keuangan perusahaan sejenis pada periode yang sama.

7. Lengkap

Informasi keuangan lengkap bila memenuhi enam tujuan kualitatif diatas dan dapat memenuhi standard pengungkapan laporan keuangan. Standard itu menghendaki pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting dan penyajian fakta secara jelas agar tidak menyesatkan pemakainya.

Informasi keuangan dari suatu perusahaan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dengan informasi

keuangan yang diperoleh, mereka menganalisisnya dan kemudian menentukan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pengembangan usaha. Maka penyusunan laporan keuangan juga harus memenuhi kualitas primer dan sekunder. Kualitas primer adalah kualitas utama yang membuat informasi akuntansi berguna sebagai dasar pengambilan keputusan. Kualitas primer meliputi:

1. Relevan

Informasi akuntansi dikatakan relevan jika dapat membuat perbedaan dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh para pemakainya. Informasi yang relevan adalah informasi yang memiliki nilai prediktif, umpan balik dan tepat waktu.

- a. Informasi memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat membantu para pemakainya untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan berdasarkan peristiwa (transaksi) masa lalu, sekarang, dan yang akan datang.
- b. Informasi memiliki umpan balik (*feedback*) jika informasi tersebut dapat mendukung atau memberi masukan untuk memperbaiki prediksi yang sudah dibuat oleh para pemakainya.
- c. Tepat waktu berate informasi akuntansi tersebut tersedia pada saat dibutuhkan oleh para pemakainya. Dengan demikian, informasi itu tidak kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan yang diambil.

2. Handal (*reliable*)

Informasi tersebut dapat dipercaya karena cukup terbebas dari kesalahan dan penyimpangan di dalam penyajiannya. Informasi yang handal adalah

informasi yang memenuhi syarat: dapat diperiksa, penyajian yang jujur dan netral.

- a. Dapat diperiksa artinya laporan keuangan (informasi akuntansi) tersebut jika di audit/diperiksa oleh beberapa auditor eksternal yang menggunakan metode sama akan memperoleh kesimpulan yang sama pula.
- b. Penyajian yang jujur artinya laporan keuangan disajikan sesuai dengan kondisi transaksi keuangan sebenarnya (kondisi riil) tanpa adanya rekayasa.
- c. Netral artinya tidak berpihak kepada golongan pemakai informasi tertentu.

Kualitas sekunder merupakan kualitas tambahan yang seharusnya dipenuhi dalam penyusunan laporan keuangan. Meskipun hal ini bukan kualitas utama, namun jika dipenuhi akan membawa dampak positif bagi pengguna/pemakainya.

Kualitas sekunder meliputi:

1. Keterbandingan

Informasi laporan keuangan suatu perusahaan akan lebih bermakna bagi para pemakainya jika dapat diperbandingkan dengan informasi yang serupa dari perusahaan-perusahaan lain. Suatu informasi dapat diperbandingkan jika sudah dievaluasi dan dilaporkan dengan cara yang sama untuk perusahaan-perusahaan yang berbeda.

2. Konsistensi

Dalam menyajikan informasi, perusahaan harus memberikan perlakuan akuntansi yang sama terhadap transaksi yang sama pada waktu-waktu yang berbeda. Namun, jika terjadi perubahan metode (perlakuan) akuntansi maka pada periode dilaksanakannya perubahan itu perusahaan harus mengungkapkan (dalam laporan keuangannya) tentang berbagai hal yang terkait dengan perubahan itu. (Susilowati, 2015)

Lebih singkatnya nilai-nilai yang terkandung laporan keuangan pemerintah daerah juga mengandung nilai-nilai yang tercantum didalam prinsip akuntansi syariah yang meliputi nilai pertanggungjawaban, keadilan dan kebenaran. Ketiga nilai tersebut tentu saja telah menjadi prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi. Makna yang terkandung dalam tiga prinsip umum tersebut terdapat dalam sura Al-Baqarah: 282:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Implikasi dalam akuntansi bahwa individu/instansi yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait dalam bentuk laporan keuangan.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam melakukan transaksi dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh entitas dicatat dengan benar. Keadilan dalam konteks aplikasi syariah berkaitan dengan praktik moral kejujuran yang merupakan

faktor yang sangat dominan dan berkaitan dengan nilai-nilai etika/syariah dan moral.

3. Prinsip kebenaran

Dalam akuntansi akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Aktivitas ini akan berjalan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. (Ali Maulidi, 2014)

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan komitmen Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standard akuntansi pemerintahan menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan yang kualitatif merupakan laporan keuangan yang berisi informasi sesuai dengan kriteria berikut: handal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Yusup, 2016).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Tujuan laporan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Tujuan dari laporan keuangan sektor publik yaitu:

1. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan fungsinya
2. Melaporkan hasil operasi
3. Melaporkan kondisi keuangan

4. Melaporkan sumberdaya jangka panjang.

Secara umum para pengguna laporan keuangan sektor publik memerlukan informasi yang dapat membantunya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, social dan politik. Evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga memperhatikan rencana-rencana serta hasil dari pelaksanaan rencana-rencana tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangannya. Para pengguna laporan keuangan menginginkan laporan keuangan sector publik dapat memberikan informasi mengenai pengurusan dan ketaatan, kondisi keuangan, kinerja dan dampak ekonomi. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama mengapa pemerintah daerah perlu mempublikasikan laporan keuangan, yaitu:

1. Dari sisi intern, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya (Satuan Kerja Perangkat Daerah).
2. Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal, yaitu pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat, investyor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan laporan tersebut sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, social, dan politik. (Mahmudi, 2016)

Transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik yang harus direspon secara positif. Dengan dilakukannya transparansi tersebut publik akan memperoleh informasi yang actual dan factual, sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan. (realisasi v.s anggaran)
2. Menilai ada tidaknya unsur korupsi dan manipulasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran
3. Menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait
4. Mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pemerintah dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait (Mahmudi, 2016)

Lebih lanjut Mahmudi (2016) mengatakan bahwa Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan indikator-indikator berikut:

1. Dapat dipahami
2. Relevan
3. Keterandalan
4. Dapat diperbandingkan
5. Transparansi.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni : Relevan, Andal, Netral, Dapat dibandingkan dan Dapat dipahami.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (www.djkd.kemendagri.go.id). Kaitan antara SIPKD dengan kualitas laporan keuangan adalah apabila pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah diharapkan akan berjalan efektif dengan mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/output dan relevansi. Maka dengan efektifnya penerapan SIPKD diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari

berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (www.djkd.kemendagri.go.id). Kaitan antara SIPKD dengan kualitas laporan keuangan adalah apabila pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah diharapkan akan berjalan efektif dengan mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/output dan relevansi. Maka dengan efektifnya penerapan SIPKD diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (www.djkd.kemendagri.go.id). Kaitan antara SIPKD dengan kualitas laporan keuangan adalah apabila pengolahan data keuangan yang diterapkan oleh Pemerintah daerah diharapkan akan berjalan efektif dengan mempertimbangkan elemen-elemen penting dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan daerah seperti keamanan data, kecepatan dan ketepatan waktu, ketelitian, variasi laporan/output dan relevansi. Maka dengan efektifnya penerapan SIPKD diharapkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kaitan antara pemanfaatan teknologi yang diterapkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah, menunjukkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

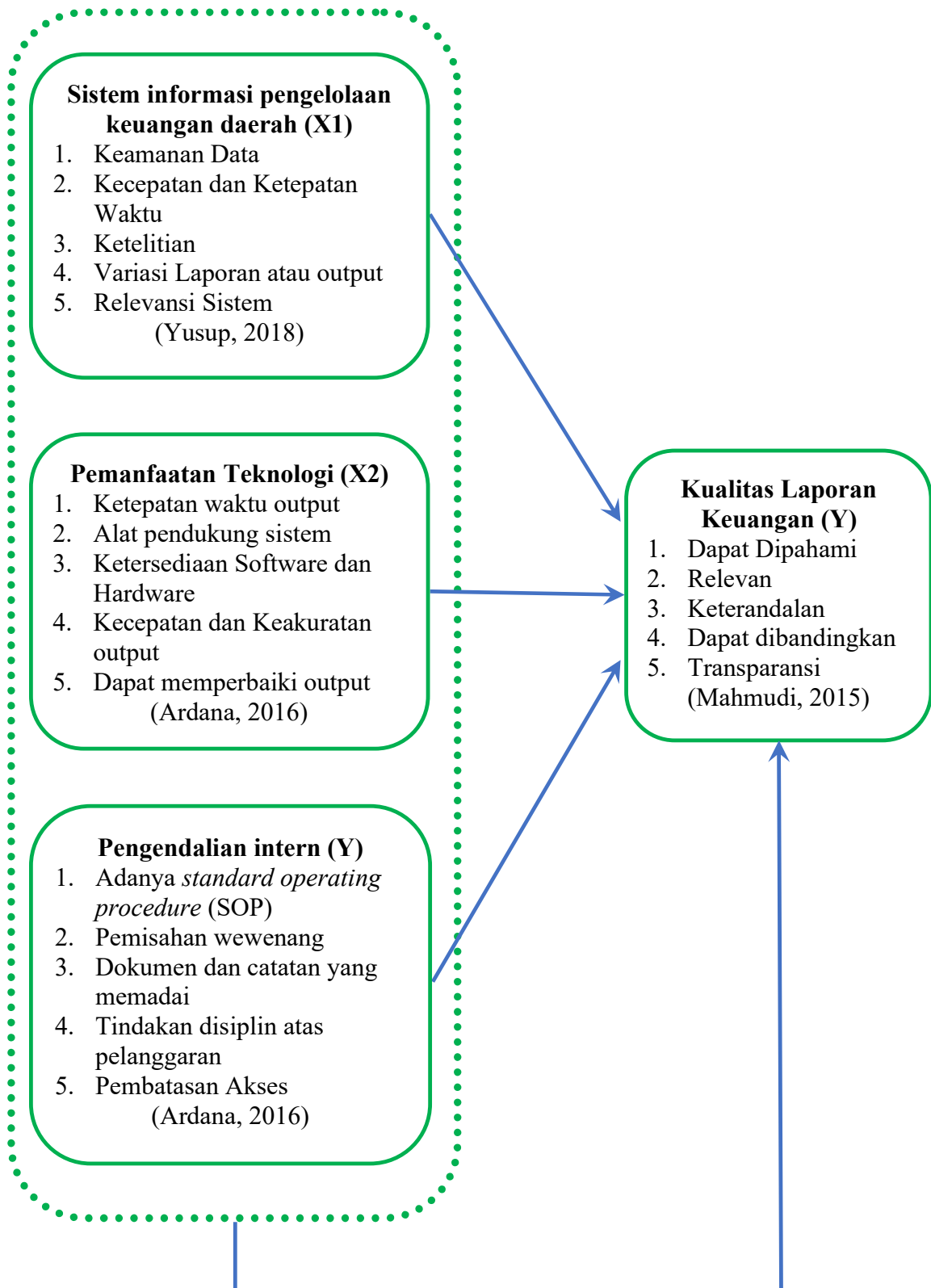
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) juga dibutuhkan dalam menjaga kualitas laporan keuangan, hal melibatkan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Pengawasan dalam sistem pengendalian intern diarahkan antara lain untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengaruh variabel penerapan SIPKD (X1) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh Yani (2015), serta didukung dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yulia Ratna Sari (2018).

Pengaruh variabel Pemanfaatan Teknologi (X2) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan Krismiaji (2015), serta didukung dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febrian Cahyo Pradono (2015).

Pengaruh variabel Pengendalian Intern (X3) terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y) didasarkan oleh teori yang dikemukakan oleh I Cenic Ardana (2016), serta didukung dalam kajian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iami Deshinta Sari (2017).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kerangka konsep penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1 Skema Kerangka Berfikir

3.2 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, landasan teori dan kerangka konseptual, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh secara parsial penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Terdapat pengaruh secara simultan penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pengendalian intern berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat

3.3 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan penegasan istilah yang bersumber dari kamus atau bahan kajian literature yang relevan dengan penelitian.

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang

pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. Menurut Yusup (2018), Indikatornya adalah

- a. Keamanan Data: Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjamin keamanan data laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) membantu mempercepat pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
- c. Ketelitian: Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.
- d. Variasi Laporan atau output: Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) meningkatkan kualitas output laporan keuangan pemerintah daerah.
- e. Relevansi Sistem: Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) telah sesuai dengan kebutuhan instansi daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Pemanfaatan Teknologi

Teknologi informasi adalah semua peralatan, media, teknik, metode yang digunakan dalam rangka merekam data, mengirim dan menerima data, mengolah data, menyimpan data dan informasi. Menurut Ardana (2016), indikatornya adalah:

- a. Ketepatan waktu output: Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Alat pendukung sistem: Teknologi informasi merupakan alat pendukung kesuksesan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil laporan keuangan.
 - c. Ketersediaan Software dan Hardware: Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi didukung ketersediaan *hardware* dan *software* yang mutakhir.
 - d. Kecepatan dan Keakuratan output: Pemanfaatan Teknologi informasi membuka peluang untuk mengkses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.
 - e. Dapat memperbaiki output: Pemanfaatan Teknologi Informasi menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan akurat.
3. Pengendalian intern

Pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada dalam perusahaan. Pengendalian intern diharapkan dapat melindungi kekayaan perusahaan yang diakibatkan dari pencurian, penggelapan keuangan oleh karyawan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat, dan lain sebagainya. Menurut Ardana (2016), indikatornya adalah :

- a. Adanya *standard operating procedure* (SOP): Pengendalian intern telah diimplementasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.
 - b. Pemisahan wewenang: Adanya pemisahan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.
 - c. Dokumen dan catatan yang memadai: Setiap transaksi dan aktivitas telah didukung dengan otorisasi dan bukti-bukti yang memadai.
 - d. Tindakan disiplin atas pelanggaran: menerapkan sanksi dan menanamkan efek jera terhadap oknum yang melakukan penyimpangan dan kecurangan.
 - e. Pembatasan Akses: Penerapan adanya penentuan batas dan penentuan toleransi.
4. Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan standard akuntansi keuangan, tujuan akuntansi dan laporan keuangan pada dasarnya untuk menyediakan informasi keuangan suatu badan usaha. Informasi keuangan yang disajikan akan bermanfaat apabila memenuhi kriteria kualitas informasi keuangan yakni relevan, dapat diuji, dapat dimengerti, netral, tepat waktu, daya banding dan lengkap. Menurut Mahmudi (2015), indikatornya adalah

- a. Dapat Dipahami: Informasi keuangan yang disajikan oleh Instansi atau lembaga dapat dipahami oleh pengguna.

- b. Relevan: Laporan Keuangan yang dihasilkan memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu dan telah disajikan secara lengkap dan tepat waktu.
- c. Keterandalan: Transaksi yang disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan, bebas dari kesalahan yang bersifat material.
- d. Dapat dibandingkan: Informasi keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.
- e. Transparansi: Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Desain Penelitian

Bertolak dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian berjenis penelitian kuantitatif dengan metode survei dengan teknik analisis korelasional untuk mengetahui pengaruh hubungan variabel terikat dan variabel bebas.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Pengambilan lokasi tersebut didasarkan pada sasaran penelitian yaitu kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Waktu penelitian di rencanakan kurang lebih satu bulan yaitu, pada bulan Juli 2021 sampai dengan Agustus 2021.

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai seluruh pegawai yang berada pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2013:218-219) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Adapun kriteria sampel adalah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan, jumlah sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Sampel Penelitian

No	Bagian	Jumlah
1.	Kepala Badan	1 Orang
2.	Sekretaris dan Kepala Bidang	7 Orang
3.	Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian	21 Orang
4.	Staf Bidang Akuntansi	9 Orang
5.	Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	9 Orang
6.	Staf Sub Bagian Keuangan	7 Orang
Total		54 Orang

4.4 Skala dan Pengukuran Data

Pengukuran data penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi responden terhadap obyek (Nazir, 2009). Penggunaan skala Likert karena pertimbangan sebagai berikut: (1) mempunyai banyak kemudahan; (2) mempunyai realibilitas yang tinggi dalam mengurutkan subyek berdasarkan persepsi; (3) fleksibel dibanding teknik yang lain; (4) aplikatif pada berbagai situasi. Pengolahan data, skala Likert termasuk dalam skala interval. Penentuan skala Likert dalam penelitian ini dari skala 1 sampai dengan 5. Pedoman untuk pengukuran semua variabel adalah dengan menggunakan 5 poin likert scale. kategori dari masing-masing jawaban dengan suatu kriteria sebagai berikut: Sangat Baik/Sangat Setuju (skor 5); Baik/Setuju (skor 4); Cukup baik/ Netral (skor 3); Tidak Baik/Tidak Setuju (skor

2): Sangat Tidak Baik/Sangat Tidak Setuju (skor 1) (Malhotra, 2010; Cooper & Seindler, 2003).

4.5 Pengujian Instrumen Penelitian

Angket sebelum digunakan dalam pengumpulan data dilapangan, harus memenuhi dua uji instrumen yaitu tingkat *validitas* dan *realibilitas*. Pengujian instrumen dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik atau sesuai dengan standar metode penelitian. Mengingat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner, maka keseriusan atau kesungguhan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan merupakan unsur penting dalam penelitian. Keabsahan atau kesahihan data hasil penelitian sosial sangat ditentukan oleh instrumen yang digunakan.

Instrumen dikatakan baik apabila memenuhi tiga persyaratan utama yaitu: (1) valid atau shahi; (2) reliabel atau andal; dan (3) praktis (Cooper dan Seindler.,2003). Bilamana alat ukur yang digunakan tidak valid atau tidak dapat dipercaya dan tidak andal atau reliabel, maka hasil penelitian tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk menguji kuisisioner sebagai instrumen penelitian maka digunakan uji validitas (*test of validity*) dan uji realibilitas (*test of reliability*).

Pada penelitian ini, uji validitas dan realibilitas, di lakukan untuk memastikan tingkat validitas dan realibilitas instrumen. Hasil analisisnya menunjukkan semua variabel penelitian adalah valid berdasarkan nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,30 pada semua item pernyataan setiap indikator.

Kemudian nilai koefisien korelasi *cronbach alpha* lebih besar dari 0.60 menunjukkan seluruh variabel penelitian adalah realibel. Terpenuhinya validitas dan realibilitas angket, maka pengumpulan data dilapangan sudah tepat dilakukan.

4.5.1 Uji Validitas Instrumen (*test of validity*)

Instrumen dalam penelitian ini dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur konstruk yang akan di ukur dan dapat mengungkapkan data serta variabel-variabel yang diteliti secara konsisten. Validitas merupakan ukuran yang berhubungan dengan tingkat akurasi yang dicapai oleh sebuah indikator dalam mengukur konstruk yang seharusnya di ukur. Uji validitas adalah ketepatan skala atas pengukuran instrumen yang digunakan dengan maksud untuk menjamin bahwa alat ukur yang digunakan, dalam hal ini pernyataan pada kuesioner sesuai dengan obyek yang diukur. Instrumen dapat dikatakan mempunyai validitas tinggi apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya.

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha=0,05$. Instrumen dikatakan valid mempunyai nilai signifikansi korelasi \leq dari 95% atau $\alpha = 0,05$ (Sugiono, 2010). Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien *korelasi product moment Pearson*. Kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen yang dikatakan valid jika nilai $r \geq 0.30$ (*cut of point*) (Sugiono, 2010).

4.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen (*Test Of Reliability*)

Uji Reliabilitas adalah uji kehandalan yang bertujuan mengetahui seberapa jauh sebuah alat ukur dapat diandalkan atau dipercaya. Kehandalan berkaitan dengan estimasi sejauh mana suatu alat ukur, apabila dilihat dari stabilitas atau

konsistensi internal dari jawaban atau pernyataan jika pengamatan dilakukan secara berulang. Apabila suatu alat ukur digunakan berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur tersebut dianggap handal (reliabilitas).

4.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan survei dengan instrumen angket yang disebar kepada responden. Proses yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data primer dengan metode survei melalui instrumen penelitian (angket) dan wawancara, yaitu sebagai berikut:

1. Angket sebagai instrumen utama dalam penelitian ini berisi sejumlah item pernyataan bersifat tertutup yang disusun berdasarkan hasil kajian teoritis dan empiris serta informasi yang diperoleh pada objek penelitian. Setelah instrumen penelitian disusun, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap *face dan content validity*, kalimat serta maksud dari setiap pernyataan.
2. Data yang diperoleh dari distribusi instrumen penelitian secara keseluruhan selanjutnya diperiksa, ditabulasi, *di-screening*, serta dianalisis untuk menjawab dan membahas masalah yang diteliti dalam penelitian ini.
3. Wawancara (*interview*) langsung dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh informasi yang mendalam dari variabel-variabel penelitian dari responden penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

4.7 Teknik Analisa Data

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan. Dalam analisis ini digunakan bentuk tabel dan nilai rata-rata untuk memperjelas deskripsi variabel.

Teknik analisa data kuantitatif yang diperoleh dari hasil kuesioner dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis). Analisis linier berganda dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen (X) yang ditunjukkan oleh variabel dependen (Y) Kualitas Laporan Keuangan. Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda syarat uji regresi yang harus dipenuhi adalah:

Bentuk umum dari model yang akan digunakan adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas laporan keuangan

X1 = Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

X2 = Pemanfaatan Teknologi

X3 = Pengendalian Intern

b_1, b_2, b_3, \dots = Koefisien pengaruh

α = Konstanta

e = Kesalahan Prediksi

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu: Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X₁), Pemanfaatan Teknologi (X₂) dan Pengendalian Intern (X₃) terhadap variabel terkait yaitu kualitas laporan Keuangan (Y) secara bersama-sama, maka dilakukan uji F.

Kemudian untuk mengetahui : Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X_1), Pemanfaatan Teknologi (X_2) dan Pengendalian Intern (X_3) terhadap variabel terkait yaitu kualitas laporan Keuangan (Y) secara parsial maka dilakukan uji t.

a. Pengujian hipotesis secara Parsial

Hipotesis tersebut akan diuji berdasarkan pada analisis dihasilkan dari model regresi berganda.

- 1) H_0 berarti variabel independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) H_a berarti variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 3) Dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan dengan degree of freedom ($n - k - 1$) dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah jumlah variabel independent. Sedangkan t tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan sebesar 5% dan $df = (n - 1)$, sehingga (Ghozali, 2006)

b. Pengujian hipotesis secara simultan

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel dependen. Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut:

- 1) H_0 : berarti secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) H_a : berarti secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dan dengan degree of freedom (k) dan $(n-k-1)$ dimana n adalah jumlah observasi dan k adalah variabel independen. Maka nilai F hitung dirumuskan sebagai berikut.

$$F = \frac{\frac{R^2}{k}}{\frac{(1-R^2)}{n-k-1}}$$

Dimana:

R^2 = R Square

n = Banyaknya Data

k = Banyaknya variabel independent

Sedangkan F tabel ditentukan dengan melihat tingkat signifikan α sebesar 5% dan $df = (n-1)$, sehingga (Ghozali, 2006)

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. F < 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yakni secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $Sig. F > 5\%$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yakni secara simultan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

a. Gambaran Singkat BPKPD Prov. Sulbar

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Badan ini didirikan pada tahun 2016. Jumlah pegawai pada badan ini ialah berjumlah 157 Orang yang terdiri dari 120 ASN dan 37 Pegawai Honorer. Jumlah unit kerja yang di bawah oleh badan ini berjumlah 12 yang terdiri dari sekretariat, bidang pajak, bidang non pajak, bidang penyusunan anggaran dan bina kab/kota, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, bidang pengelolaan barang milik daerah, UPTBD samsat Mamuju, UPTBD samsat Mamuju Utara, UPTBD samsat Majene, UPTBD samsat Polewali Mandar, dan UPTBD samsat Mamasa.

Adapun visi badan ini ialah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan di BPKPD Provinsi Sulawesi Barat. Misinya ialah menjadi institusi yang responsif dalam mewujudkan optimalisasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah secara efektif, transparan dan akuntabel.

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPKPD Prov. Sulbar

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat

Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Barang Milik Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Provinsi Sulawesi Barat dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah Provinsi.

2. Tugas Pokok

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut BPKPD Provinsi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Keuangan, Pendapatan, dan Barang Milik Daerah.

3. Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;

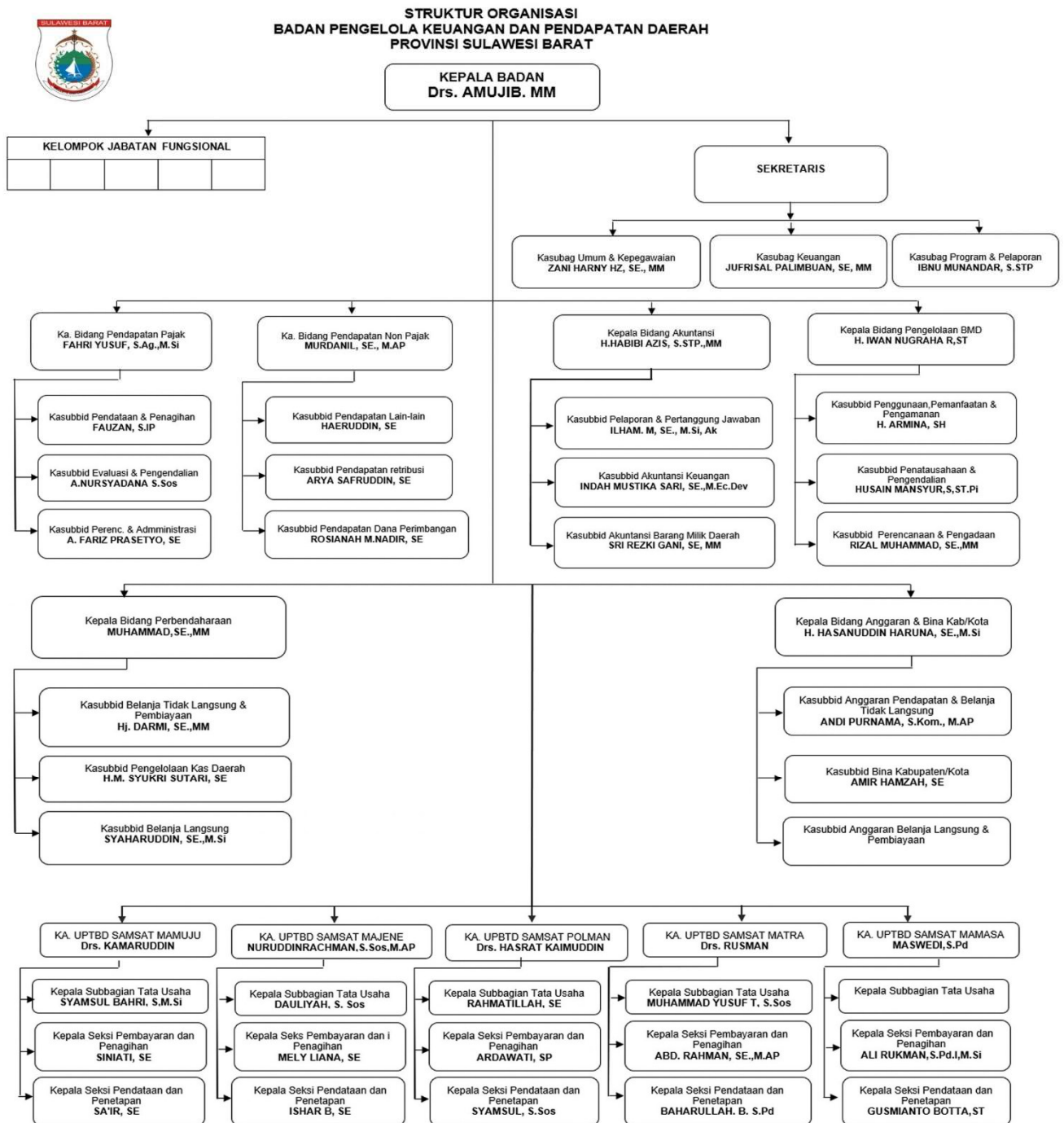
- 2) Pelaksanaan kebijakan dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 3) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 4) Pengkoordinasian dan fasilitasi dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 5) pengendalian dibidang Anggaran, Pendapatan, Perbendaharaan, Akuntansi, Barang Milik Daerah dan Bina Kabupaten/Kota;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Struktur Organisasi BPKPD Prov. Sulbar

Badan termasuk dalam suatu organisasi, maka dari hal tersebut sebagai organisasi yang baik semestinya memiliki pembagian tugas masing-masing yang dimiliki oleh setiap orang-orang di dalamnya. Guna menjadi organisasi yang berkualitas maka setiap organisasi membagikan tugas kepada setiap orang-orang di dalamnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Jika berbicara mengenai Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat maka struktur organisasinya sebagai berikut:

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut :

Gambar 5.1 Struktur Organisasi BPKPD Prov. Sulbar



5.1.2 Deskripsi Data

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada responden yang bekerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang terpilih menjadi sampel melalui proses sampel yang telah dijelaskan pada bab metode penelitian.

Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 2 Agustus sampai tanggal 10 Agustus 2021. Pendistribusian kuesioner dilakukan dengan cara mengantarkan langsung kuesioner kepada para pegawai yang menjadi sampel penelitian. Peneliti menetapkan janji untuk pengambilan kuesioner selama 1 minggu terhitung sejak kuesioner diantarkan kepada responden atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan antara responden dan peneliti. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 54 responden. Dari pengembalian kuesioner yang disebarkan, 54 (100%) kuesioner yang diterima kembali oleh peneliti.

Tabel 5.1 Rincian Pengembalian Kuesioner

NO	Bidang BPKPD	Jumlah Kuesioner yang dibagikan	Jumlah Kuesioner yang dikembalikan
1	Kepala Badan	1	1
2	Sekretaris dan Kepala Bidang	7	7
3	Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian	21	21
4	Staf Bidang Akuntansi	9	9
5	Staf Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	9	9
6	Staf Sub Bagian Keuangan	7	7
Total		54	54

Sumber: Data diolah (2021)

5.1.3 Deskripsi Responden

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang responden penelitian yang terdiri dari: (1) Jenis Kelamin, (2) Tingkat Pendidikan, (3) Golongan dan (4) Masa Kerja (Tahun). Adapun tabel demografi tersebut sebagai berikut:

5.1.3.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Data jenis kelamin responden pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2 Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Laki-Laki	31	57,4	57,4	57,4
	Perempuan	23	42,6	42,6	100,0
Total		54	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan dari jenis kelamin, responden dibagi menjadi dua yaitu laki-laki dan perempuan. Dari hasil kuesioner yang disebarkan ditemukan bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan responden perempuan. Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 31 orang dengan tingkat persentase 57,4% dan responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang dengan tingkat persentase 42,6%.

5.1.3.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Terdapat empat klasifikasi yang digunakan untuk mengelompokkan tingkat pendidikan responden, hasil perhitungan persentase mendapatkan mayoritas dari mereka berlatar belakang berpendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 27 orang dengan tingkat persentase mencapai 50%. Kelompok lain yang memiliki jumlah

banyak adalah responden berlatar belakang pendidikan Magister (S2) dengan jumlah 20 orang dengan tingkat persentase mencapai 37%, kemudian berpendidikan SMA/SMK dengan jumlah 4 orang dengan tingkat persentase mencapai sebanyak 7,4%, dan yang berpendidikan diploma dengan jumlah 3 orang dengan tingkat persentase mencapai sebanyak 5,6% Perincian sebaran tingkat pendidikan diperlihatkan pada Tabel 5.3 berikut.

Tabel 5.3 Tingkat Pendidikan Responden

		Tingkat Pendidikan			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	Magister (Strata2)	20	37,0	37,0	37,0
	Sarjana (Strata1)	27	50,0	50,0	87,0
	Diploma (D3)	3	5,6	5,6	92,6
	SMA/SMK	4	7,4	7,4	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

5.1.3.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan

Data golongan responden pada Tabel 5.4 berikut:

Tabel 5.4 Golongan Responden

		Golongan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Gol IV	8	14,8	14,8	14,8
	Gol III	42	77,8	77,8	92,6
	Gol II	4	7,4	7,4	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan dari golongan, responden dibagi menjadi tiga yaitu golongan IV, golongan III dan golongan II. hasil perhitungan persentase mendapatkan mayoritas dari responden golongan III dengan jumlah 42 orang dengan tingkat

persentase mencapai 77,8%. Kelompok lain yang memiliki jumlah banyak adalah responden golongan IV dengan jumlah 8 orang dengan tingkat persentase mencapai 14,8%, kemudian golongan II dengan jumlah 4 orang dengan tingkat persentase mencapai sebanyak 7,4%.

5.1.3.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Pengelompokan responden berdasarkan masa kerja memberikan hasil sebagai berikut: responden yang paling banyak adalah mereka yang masa kerja 11-15 tahun yaitu sebanyak 23 orang dengan tingkat persentase 42,6%, diikuti yang masa kerja 6-10 tahun yaitu sebanyak 18 orang dengan tingkat persentase 33,3%, kemudian yang masa kerja 16-20 tahun dan > 21 tahun masing-masing sebanyak 6 orang dengan tingkat persentase 11,1% dan responden yang paling sedikit adalah yang masa kerja 1-5 tahun sebanyak 1 orang dengan tingkat persentase 1,9%. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 5.5 berikut:

Tabel 5.5 Masa Kerja Responden

		Masa Kerja			Cumulative Percent
		Frequency	Percent	Valid Percent	
Valid	1 – 5 Tahun	1	1,9	1,9	1,9
	6 – 10 Tahun	18	33,3	33,3	35,2
	11 – 15 Tahun	23	42,6	42,6	77,8
	16 – 20 Tahun	6	11,1	11,1	88,9
	> 21 Tahun	6	11,1	11,1	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

5.1.4 Deskripsi Indeks Jawaban Responden

Deskripsi indeks jawaban per variabel ini bertujuan mengetahui gambaran deskriptif mengenai jawaban atas item-item pertanyaan yang diajukan pada

responden. Teknik skoring yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan skor maksimal 5 dan minimal 1, maka perhitungan indeks jawaban responden dengan rumus berikut :

$$\text{Nilai Indeks} = \{(\%F1 \times 1) + (\%F2 \times 2) + (\%F3 \times 3) + (\%F4 \times 4) + (\%F5 \times 5)\} / 5$$

Keterangan :

F1 : frekuensi responden yang menjawab 1 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F2 : frekuensi responden yang menjawab 2 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F3 : frekuensi responden yang menjawab 3 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F4 : frekuensi responden yang menjawab 4 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

F5 : frekuensi responden yang menjawab 5 dari skor yang digunakan dalam daftar pertanyaan kuesioner.

Total nilai indeks adalah 100 dengan menggunakan metode tiga kotak (Three-box Method). Penggunaan metode tiga kotak (Three-box Method) membagi nilai kedalam katagori yakni rendah (10,00 - 40,00), sedang (40,01 - 70,00) dan tinggi (70,01 - 100).

5.1.4.1 Deskripsi Indeks Jawaban Responden Terhadap Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

Variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban

terhadap variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.6 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	1	2	3	4	5	Jumlah (%)	Indeks (%)
X1.1	5,6%	13%	29,6%	50%	1,9%	330	66
X1.2	3,7%	3,7%	29,6%	63%		352	70
X1.3	5,6%	1,9%	27,8%	61,1%	3,7%	356	71
X1.4	3,7%	5,6%	25,9%	61,1%	3,7%	356	71
X1.5	5,6%	37%	14,8%	42,6%		294	59
Rata-Rata						338	68

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Rata-rata indeks skor jawaban variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah diperoleh sebesar 68. Berdasarkan kategori indeks skor berdasarkan three box method, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah di kategori sedang.

5.1.4.2 Deskripsi Indeks Jawaban Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan Teknologi (X2)

Variabel pemanfaatan teknologi pada penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel pemanfaatan teknologi disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.7 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pemanfaatan**Teknologi**

Pemanfaatan Teknologi	1	2	3	4	5	Jumlah (%)	Indeks (%)
X2.1	5,6%	14,8%	27,8%	46,3%	5,6%	332	66
X2.2	11,1%	18,5%	27,8%	33,3%	9,3%	311	62
X2.3	1,9%	20,4%	33,3%	38,9%	5,6%	326	65
X2.4	1,9%	16,7%	31,5%	50%		330	66
X2.5	5,6%	20,4%	27,8%	44,4%	1,9%	317	63
Rata-Rata						323	65

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Rata-rata indeks skor jawaban variabel pemanfaatan teknologi diperoleh sebesar 65. Berdasarkan kategori indeks skor berdasarkan three box method, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah di kategori sedang.

5.1.4.3 Deskripsi Indeks Jawaban Responden Terhadap Variabel Pengendalian Intern (X3)

Variabel pengendalian intern pada penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel pengendalian intern disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.8 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Pengendalian**Intern**

Pengendalian Intern	1	2	3	4	5	Jumlah (%)	Indeks (%)
X3.1	9,3%	25,9%	13%	50%	1,9%	310	62
X3.2	7,4%	29,6%	7,4%	55,6%		311	62
X3.3	16,7%	29,6%	7,4%	46,3%		283	57
X3.4	5,6%	35,2%	5,6%	53,7%		308	62
X3.5	5,6%	29,6%	9,3%	55,6%		315	63
Rata-Rata						305	61

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Rata-rata indeks skor jawaban variabel pengendalian intern diperoleh sebesar 61. Berdasarkan kategori indeks skore berdasarkan three box method, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah di kategori sedang.

5.1.4.4 Deskripsi Indeks Jawaban Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel kualitas laporan keuangan pada penelitian ini diukur dengan 5 butir pertanyaan. Hasil jawaban dan analisis indeks skor jawaban terhadap variabel kualitas laporan keuangan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.9 Hasil Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kualitas Laporan**Keuangan**

Kualitas Laporan Keuangan	1	2	3	4	5	Jumlah (%)	Indeks (%)
Y.1	18,5%	16,7%	11,1%	50%	3,7%	304	61
Y.2	13%	33,3%	13%	40,7%		281	56
Y.3	3,7%	18,5%	35,2%	40,7%	1,9%	319	64
Y.4	1,9%	20,4%	33,3%	42,6%	1,9%	323	65
Y.5	5,6%	22,2%	33,3%	38,9%	3,7%	324	65
Rata-Rata						310	62

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Rata-rata indeks skor jawaban variabel kualitas laporan keuangan diperoleh sebesar 62. Berdasarkan kategori indeks skor berdasarkan three box method, maka rata-rata tersebut berada pada tingkatan skor sedang. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah di kategori sedang.

5.1.5 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai suatu data agar data yang tersaji menjadi mudah dipahami dan informatif bagi yang membacanya. Pengukuran analisis deskriptif variabel dilakukan untuk

memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel.

Tabel 5.10 Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	54	6	22	16,87	3,145
Pemanfaatan Teknologi	54	10	22	16,15	3,147
Pengendalian Intern	54	8	21	15,26	3,481
Kualitas Laporan Keuangan	54	6	21	15,31	3,458
Valid N (listwise)	54				

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

- a. Variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X1) memiliki jumlah sample sebanyak 54 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 6, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 22, nilai rata-rata (mean) sebesar 16,87 dan standar deviasi sebesar 3,145.
- b. Variabel pemanfaatan teknologi (X2) memiliki jumlah sample sebanyak 54 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 10, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 22, nilai rata-rata (mean) sebesar 16,15 dan standar deviasi sebesar 3,147.
- c. Variabel pengendalian intern (X3) memiliki jumlah sample sebanyak 54 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 8, dengan nilai tertinggi (maksimum) sebesar 21, nilai rata-rata (mean) sebesar 15,26 dan standar deviasi sebesar 3,481.
- d. Variabel kualitas laporan keuangan (Y) memiliki jumlah sample sebanyak 54 dengan nilai terendah (minimum) sebesar 6, dengan nilai tertinggi

(maksimum) sebesar 21, nilai rata-rata (mean) sebesar 15,31 dan standar deviasi sebesar 3,458.

5.1.6 Pengujian Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan pengujian untuk uji asumsi klasik dan pengujian hipotesisnya, terlebih dahulu peneliti hendak melakukan uji kualitas data berupa uji validitas dan realibilitas. Hal ini dikarenakan penelitian ini menggunakan data primer untuk mengetahui tingkat konsistensi dan keakuratan data yang telah didapatkan. Adapun uji kualitas data tersebut sebagai berikut:

5.1.6.1 Uji Validitas Instrumen (*test of validity*)

Pengujian validitas instrumen yaitu menghitung koefisien korelasi antara skor item dan skor totalnya dalam taraf signifikansi 95% atau $\alpha = 0.05$ (Santoso, 2015). Uji validitas dengan metode ini dilakukan mengkorelasikan skor jawaban yang diperoleh masing-masing item dengan skor total dari keseluruhan item. Hasil korelasi harus signifikan berdasarkan ukuran statistik. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara fungsi item dengan fungsi ukur secara keseluruhan atau dengan kata lain instrumen tersebut valid. Validitas dilakukan dengan menggunakan koefisien korelasi product moment kriteria pengujian yang digunakan pada instrumen tersebut valid jika nilai $r \geq 0,2681$ (R Tabel). Adapun hasil uji validitas dari setiap item penelitian variabel dalam penelitian ini masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, disajikan dalam Tabel 5.11 berikut:

Tabel 5.11 Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)

Variabel	Butir Instrumen	R Hitung	R Tabel	Ket
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	SIPKD 1	0,747	0,2681	Valid
	SIPKD 2	0,802	0,2681	Valid
	SIPKD 3	0,793	0,2681	Valid
	SIPKD 4	0,815	0,2681	Valid
	SIPKD 5	0,517	0,2681	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.11 maka diperoleh angka korelasi (rhitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2681. Nilai Correction Item Total Correlation (rhitung) variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X1) berada diantara 0,517 – 0,815. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2681 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X1) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

2. Pemanfaatan Teknologi (X2)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel pemanfaatan teknologi, disajikan dalam Tabel 5.12 berikut:

Tabel 5.12 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan Teknologi (X2)

Variabel	Butir Instrumen	R Hitung	R Tabel	Ket
Pemanfaatan Teknologi (X2)	Pemanfaatan Teknologi 1	0,616	0,2681	Valid
	Pemanfaatan Teknologi 2	0,678	0,2681	Valid
	Pemanfaatan Teknologi 3	0,635	0,2681	Valid
	Pemanfaatan Teknologi 4	0,571	0,2681	Valid
	Pemanfaatan Teknologi 5	0,730	0,2681	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.12 maka diperoleh angka korelasi (rhitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2681. Nilai Correction Item Total Correlation (rhitung) variabel pemanfaatan teknologi (X2) berada diantara 0,571 – 0,730. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2681 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner pemanfaatan teknologi (X2) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

3. Variabel Pengendalian Intern (X3)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel pengendalian intern, disajikan dalam Tabel 5.13 berikut:

Tabel 5.13 Hasil Uji Validitas Variabel Pengendalian Intern (X3)

Variabel	Butir Instrumen	R Hitung	R Tabel	Ket
Pengendalian Intern (X3)	Pengendalian Intern 1	0,509	0,2681	Valid
	Pengendalian Intern 2	0,708	0,2681	Valid
	Pengendalian Intern 3	0,755	0,2681	Valid
	Pengendalian Intern 4	0,648	0,2681	Valid
	Pengendalian Intern 5	0,549	0,2681	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.13 maka diperoleh angka korelasi (rhitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2681. Nilai Correction Item Total Correlation (rhitung) variabel pengendalian intern (X3) berada diantara 0,509 – 0,755. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2681 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner pengendalian intern (X3) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4. Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Untuk mengetahui pengujian validitas pada variabel kualitas laporan keuangan, disajikan dalam Tabel 5.14 berikut:

Tabel 5.14 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Variabel	Butir Instrumen	R Hitung	R Tabel	Ket
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	Kualitas Laporan Keuangan 1	0,552	0,2681	Valid
	Kualitas Laporan Keuangan 2	0,558	0,2681	Valid
	Kualitas Laporan Keuangan 3	0,740	0,2681	Valid
	Kualitas Laporan Keuangan 4	0,819	0,2681	Valid
	Kualitas Laporan Keuangan 5	0,843	0,2681	Valid

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan hasil uji validitas yang terlihat pada Tabel 5.14 maka diperoleh angka korelasi (rhitung) yang ternyata hasilnya lebih besar apabila dibandingkan dengan r tabel yang disyaratkan yaitu sebesar 0,2681. Nilai Correction Item Total Correlation (rhitung) variabel kualitas laporan keuangan (Y) berada diantara 0,552 – 0,843. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai r hitung > 0,2681 (r tabel), sehingga menunjukkan bahwa semua butir pernyataan pada kuesioner kualitas laporan keuangan (Y) adalah valid atau mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

5.1.6.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas atau kehandalan instrumen merupakan pengujian tingkat konsistensi instrumen itu sendiri. Instrumen yang baik harus konsisten dengan butir yang diukur. Kehandalan instrumen dalam penelitian akan dianalisis dengan teknik alpha cronbach dengan menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yakni indikator dari suatu variabel. Dikatakan realibilitas apabila nilai cronbach alpa > 0,60. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban responden dalam

menjawab pernyataan konsisten dan stabil (Ghozali 2016). Adapun hasil uji reliabilitas dari setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.15 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Realibilitas	Ket
Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X ₁)	0,768	0,60	Realibilitas
Pemanfaatan Teknologi (X ₂)	0,650	0,60	Realibilitas
Pengendalian Intern (X ₃)	0,631	0,60	Realibilitas
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0,705	0,60	Realibilitas

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Dari Tabel 5.15 pengujian reliabilitas dengan metode Cronbach's Alpha dapat diketahui bahwa nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah $\geq 0,60$. Berdasarkan hasil pengolahan data pada uji reliabilitas ini diperoleh nilai koefisien reliabilitas (Cronbach's Alpha) untuk variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X₁) sebesar 0,768; variabel pemanfaatan teknologi (X₂) sebesar 0,650; variabel pengendalian intern (X₃) sebesar 0,631 dan variabel kualitas laporan keuangan (Y) sebesar 0,705. Karena seluruh nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel berada diatas ambang batas (cut of point) 0,60, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkat keandalan yang dapat diterima.

5.1.7 Uji Asumsi Klasik

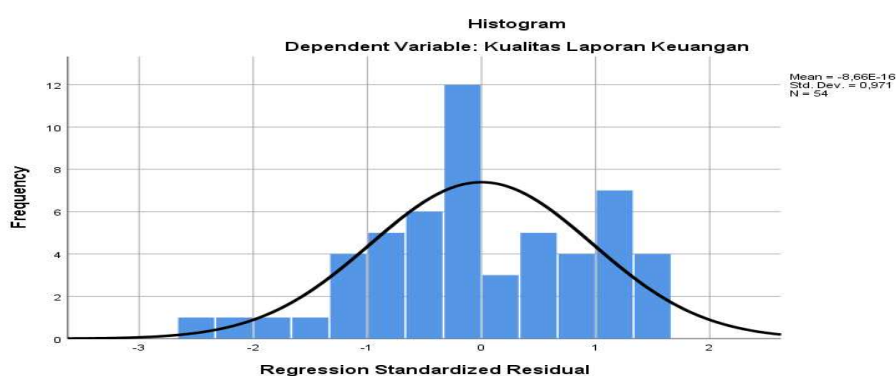
Uji asumsi klasik digunakan sebagai syarat dalam menggunakan model regresi agar hasil regresi yang diperoleh merupakan estimasi yang tepat.

5.1.7.1 Uji Normalitas

1. Analisis Grafik

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali 2016). Jenis regresi yang baik ialah data yang normal atau hampir mendekati normal.

Gambar 5.2 Grafik histogram Uji Normalitas



Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Grafik histogram dapat dikatakan normal ketika ia membentuk seperti huruf U terbalik. Hal ini berarti tidak terjadinya pola distribusi yang hanya condong kesatu arah saja, melainkan merata antara ke kiri dan ke kanannya.

Gambar 5.3 Normal Probability Plot



Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Adapun mengenai gambar 5.3 ialah grafik normal P-Plot. Suatu data yang dapat dikatakan normal ialah ketika data-data yang berupa bulatan kecil tersebut mengikuti arah ataupun tidak terlalu jauh dari arah garis diagonal, sehingga dapat diasumsikan bahwa data tersebut telah memenuhi asumsi normalitas.

2. Uji Statistik

Tabel 5.16 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardize d Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22809879
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,073
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan tabel 5.16 nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai sebesar 0,200 yang lebih besar dari 0,05 yang membuktikan bahwa data residual dari hasil penelitian ini terdistribusi secara normal.

5.1.7.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ialah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Ghozali 2016).

Jika variable independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel orthogonal adalah variable independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah dengan cara melihat nilai variace inflation factor (VIF). Jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransi lebih besar dari 0.1 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 5.17 Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1,434	2,040		-,703	,485		
1 Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	,367	,119	,333	3,076	,003	,707	1,414
Pemanfaatan Teknologi	,290	,121	,264	2,395	,020	,684	1,462
Pengendalian Intern	,386	,099	,388	3,895	,000	,836	1,196

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 5.17 dapat menjelaskan bahwa:

1. Variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai tolerance $0,707 > 0,1$ dan VIF $1,414 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.

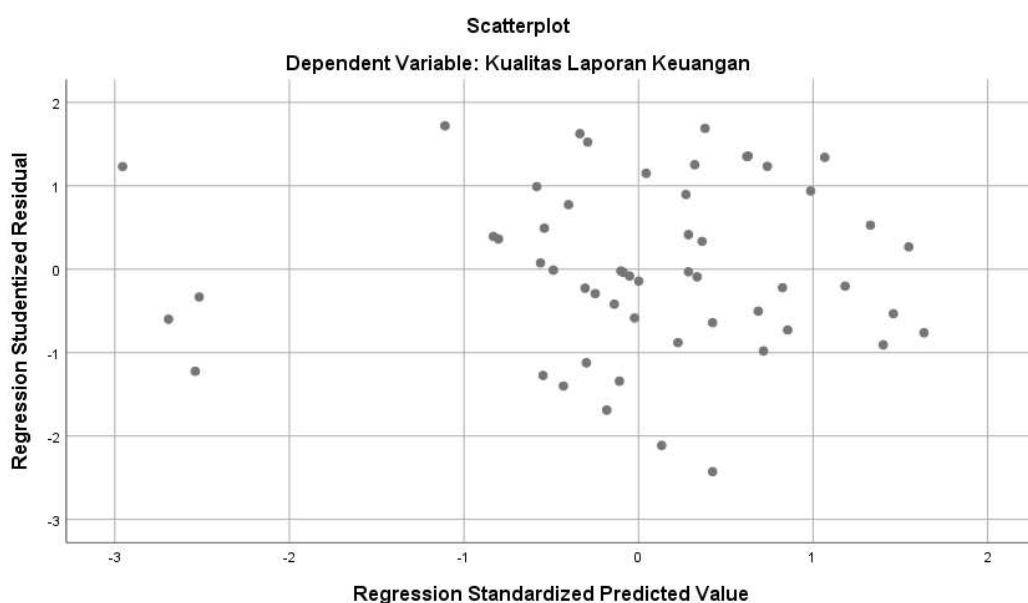
2. Variabel pemanfaatan teknologi memiliki nilai tolerance $0,684 > 0,1$ dan VIF $1,462 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.
3. Variabel pengendalian intern memiliki nilai tolerance $0,836 > 0,1$ dan VIF $1,196 < 10$ maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

5.1.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk melihat ketidaksamaan varian dari satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model uji regresi. Regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas (Ghozali 2016). Adapun untuk melihat terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas maka digunakan Grafik Scatterplot menjadi titik acuannya. Selain melihat dari Grafik Scatterplot, uji glesjer juga dapat menjadi acuan terjadi atau tidaknya suatu heteroskedastisitas.

1. Analisis Grafik

Gambar 5.4 Grafik Scatterplot



Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan gambar 5.4 menunjukkan bahwa titik-titik tidak tersebar secara teratur. Titik-titik pada grafik di atas tersebar secara acak dan tersebar merata baik di bawah angka 0 pada sumbu Y dan juga di atas angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi pada penelitian ini.

2. Uji Statistik

Uji heteroskedasitas dalam penelitian ini juga menggunakan uji glesjer. Uji ini digunakan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan variance dari residual dalam suatu pengamatan ke pengamatan yang lainnya dalam suatu model regresi.

Tabel 5.18 Uji Gelsjer

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,758	1,169		1,504	,139
1 Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	,013	,068	,032	,197	,845
Pemanfaatan Teknologi	,060	,069	,144	,859	,394
Pengendalian Intern	-,076	,057	-,203	-1,338	,187

a. Dependent Variable: Abs_Res

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Heteroskedasitas terjadi ketika nilai signifikan pada setiap variabel X lebih kecil dari 0,05. Jika berdasarkan tabel 5.18 maka dapat dilihat bahwa baik variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X1), pemanfaatan teknologi (X2), dan pengendalian intern (X3) memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas pada penelitian ini.

5.1.8 Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda merupakan tahapan selanjutnya dalam penelitian ini. Tahap analisis ini hanya dapat dilakukan ketika data sudah terbukti terbebas dari multikolonieritas dan heteroskedasitas. Hal tersebut merupakan sebuah persyaratan wajib dalam setiap penelitian kuantitatif yang menggunakan uji analisis data regresi linier berganda. Adapun data penelitian ini telah terbukti normal dan telah terbebas dari multikolonieritas serta heteroskedasitas. Berikut merupakan hasil uji regresi linier berganda pada penelitian ini:

Tabel 5.19 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta		
	B	Std. Error			
(Constant)	-1,434	2,040		-,703	,485
1					
Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	,367	,119	,333	3,076	,003
Pemanfaatan Teknologi	,290	,121	,264	2,395	,020
Pengendalian Intern	,386	,099	,388	3,895	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan tabel 5.19 maka dapat diformulasikan ke dalam persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = -1,434 + 0,367X_1 + 0,290X_2 + 0,386X_3 + e$$

Dimana:

Y = Kualitas Laporan Keuangan

X₁ = Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

X_2 = Pemanfaatan Teknologi

X_3 = Pengendalian Intern

β = Koefisien Regresi

α = Konstanta

e = Tingkat Kesalahan

Berdasarkan hasil pengamatan regresi linier berganda di atas dapat menjelaskan bahwa:

- a. Konstanta (α) = -1,434 dan bernilai negatif menunjukkan bahwa jika seluruh variabel bebas dalam penelitian ini yaitu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern dianggap tidak ada atau bernilai nol maka skor variabel kualitas laporan keuangan akan semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan sangatlah membutuhkan suatu sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern untuk dapat semakin meningkat.
- b. Koefisien regresi variabel X_1 sebesar 0,367 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin meningkatnya nilai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, maka akan semakin meningkat pula nilai dari kualitas laporan keuangan.
- c. Koefisien regresi variabel X_2 sebesar 0,290 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin meningkatnya nilai

pemanfaatan teknologi, maka akan semakin meningkat pula nilai dari kualitas laporan keuangan.

- d. Koefisien regresi variabel X3 sebesar 0,386 dan bernilai positif, artinya ialah bahwa variabel pengendalian intern memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan. Semakin meningkatnya nilai pengendalian intern, maka akan semakin meningkat pula nilai dari kualitas laporan keuangan.

5.1.9 Pengujian Hipotesis

5.1.9.1 Koefisien Determinasi (R²)

Nilai koefisien determinasi bertujuan untuk melihat sejauh mana seluruh variabel X (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern) dapat mempengaruhi variabel Y (kualitas laporan keuangan) dengan melihat pada tabel R square. Adapun hasil koefisien determinasi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.20 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,765 ^a	,585	,560	2,294

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pemanfaatan Teknologi
Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Hasil analisis data pada tabel 5.20 menunjukkan bahwa nilai R Square pada penelitian ini ialah sebesar 0,585. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern sebagai variabel independent memiliki hubungan sebesar 58,5% terhadap variabel dependent yaitu variabel kualitas laporan keuangan. Nilai

R Square ini juga mengindikasikan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern sebagai variabel independent secara bersama-sama (simultan) dapat mempengaruhi variabel dependent yaitu variabel kualitas laporan keuangan sebesar 0,585 atau 58,5%. Sedangkan sisanya ($100-58,5=41,5$) 41,5% dapat dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

5.1.9.2 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t (Uji Parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah masing- masing variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependennya. Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-masing variabel bebas dengan nilai t tabel dengan peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Apabila nilai thitung \geq ttabel, maka variabel bebasnya secara individu memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Begitu pun jika tingkat signifikannya, apabila lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima. Selain itu, uji ini dapat sekaligus digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing variabel bebas tersebut mempengaruhi kualitas laporan keuangan, dengan melihat nilai t masing-masing variabel. Berdasarkan nilai t, maka dapat diketahui variabel bebas mana yang memiliki pengaruh paling dominan atau signifikan terhadap variabel terikat. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 5.21 Uji Parsial (Uji T)

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	
	B	Std. Error				
(Constant)	-1,434	2,040		-,703	,485	
1	Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	,367	,119	,333	3,076	,003
	Pemanfaatan Teknologi	,290	,121	,264	2,395	,020
	Pengendalian Intern	,386	,099	,388	3,895	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan hasil pengamatan pada tabel 5.21 dapat menjelaskan bahwa:

1. Pengaruh variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (X1) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 5.21 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 3,076 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,076 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (H_a diterima dan H_o ditolak).

2. Pengaruh variabel pemanfaatan teknologi (X2) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 5.21 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pemanfaatan teknologi sebesar 2,395 dan tingkat signifikansi sebesar 0,020. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,395 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Ha diterima dan H_0 ditolak).

3. Pengaruh variabel pengendalian intern (X3) terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Y)

Berdasarkan tabel 5.21 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pengendalian intern sebesar 3,895 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,895 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (Ha diterima dan H_0 ditolak).

4. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.21 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki nilai sebesar 0,333, variabel pemanfaatan teknologi sebesar 0,264 dan variabel pengendalian intern sebesar 0,388. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 38,8%.

5.1.9.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Apabila nilai $F_{hitung} \geq$ dari nilai F_{tabel} berarti variabel bebasnya secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Sebaliknya, apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka secara bersama-sama variabel bebasnya tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel secara bersama-sama terhadap variabel terikat maka digunakan probabilitas atau peluang kesalahan 5% ($\alpha = 0,05$). Jika probabilitas $< \alpha$ (0,05), maka hipotesis diterima. Adapun hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 5.22 Uji Simultan (Uji F)

Model		ANOVA ^a				
		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	370,534	3	123,511	23,471	,000 ^b
	Residual	263,114	50	5,262		
	Total	633,648	53			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pemanfaatan Teknologi

Sumber: Data diolah menggunakan SPSS versi 25 (2021)

Berdasarkan tabel 5.22 menunjukkan bahwa nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 23,471 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,79. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung > F tabel ($23,471 > 2,79$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

5.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, selanjutnya akan dibahas hasil penelitian sebagai berikut:

5.2.1 Uji T (Parsial)

5.2.1.1 Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.21 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebesar 3,076 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($3,076 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (H_a diterima dan H_0 ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin meningkatkan pula variabel kualitas laporan keuangan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah menurun, maka tingkat kualitas laporan keuangan juga ikut menurun. Kegiatan ini tentunya sangat membutuhkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang baik agar mendapatkan hasil efektif, efisien dan bermanfaat bagi masyarakat. Hasil ini juga sejalan dengan teori stakeholder yang menyatakan bahwa dalam setiap tindakan pemerintah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, maka dari hal itu

pemerintah mengupayakan melakukan usaha penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang terbaik dalam setiap pelaksanaan kegiatannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuraini Ismail, et.al (2021), Yulia Ratna Sari (2018), Yulis Widayanti (2019), Budisaputra Agustiawan (2020), dan Ismi Desintha Putri, et.al (2017). Jika menurut Yulia Ratna Sari (2018) yang menyatakan bahwa SIPKD pada suatu instansi memiliki peranan penting dalam menjamin tersedianya laporan keuangan daerah yang valid. Hal ini juga berarti bahwa keberhasilan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah tergantung pada penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang digunakan. Sedangkan menurut Yulis Widayanti (2019) menyatakan bahwa semakin baik Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Begitu pula dengan Ivan Budisaputra Agustiawan (2020) menyatakan bahwa Semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengiktisaran dan pengolongan dengan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) menjamin keamanan data laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) membantu

mempercepat pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah mayoritas responden setuju. dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah juga menurut responden penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) telah sesuai dengan kebutuhan instansi daerah. Adapun mengenai penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung dalam meningkatkan kualitas output laporan keuangan pemerintah daerah. Mayoritas responden juga setuju mengenai sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.1.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.21 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pemanfaatan teknologi sebesar 2,395 dan tingkat signifikansi sebesar 0,020. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ ($2,395 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh positif

signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (H_a diterima dan H_0 ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel pemanfaatan teknologi maka akan semakin meningkatkan pula variabel kualitas laporan keuangan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel pemanfaatan teknologi menurun, maka tingkat kualitas laporan keuangan juga ikut menurun. Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Restika Eklesia Mene, et.al (2018), Yulis Widayanti (2019), Siti Chodijah dan Nurul Hidayah (2018), Yulia Ratna Sari (2018), Ivan Budisaputra Agustiawan (2020), Astika Rahmawati, et.al (2018), Nuraini Ismail, et.al (2021), Siska Marini Pilander, et.al (2018) dan Mutia Ulfa (2018). Siti Chodijah dan Nurul Hidayah (2018) yang menyatakan bahwa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung penyajian laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif. Agar pelaporan keuangan pemerintah memenuhi karakteristik tersebut, maka perlu optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja.

Pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan baik dari sisi keakuratan/ketepatan hasil operasi juga mengurangi kesalahan yang terjadi. Suatu entitas akuntansi sektor publik utamanya pemerintah daerah, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi pasti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi. Jika menurut Restika Eklesia Mene, et.al (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi telah sepenuhnya memberikan hasil yang diharapkan terutama dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Yulia Ratna Sari (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang berarti terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil tabulasi jawaban responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pernyataan mengenai teknologi informasi merupakan alat pendukung kesuksesan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil laporan keuangan mayoritas responden setuju. Hal tersebut serupa dengan pernyataan mengenai pemanfaatan teknologi informasi membuka peluang untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat para responden

mayoritas juga menyetujuinya. Jika membahas mengenai optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi didukung ketersediaan *hardware* dan *software* yang mutakhir serta pemanfaatan teknologi informasi menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan akurat maka mayoritas responden menyetujuinya.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.1.3 Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel 5.21 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel pengendalian intern sebesar 3,895 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria variabel yang memiliki pengaruh signifikan yaitu ketika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05. T tabel pada penelitian ialah sebesar 2,007. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung $>$ t tabel ($3,895 > 2,007$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan (H_a diterima dan H_o ditolak).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkatnya variabel kualitas pengendalian intern maka akan semakin meningkatkan pula variabel kualitas laporan keuangan. Begitu pula sebaliknya, jika variabel pengendalian intern menurun, maka tingkat kualitas laporan keuangan juga ikut menurun. Teori *stewardship* terhadap penelitian ini digambarkan lewat eksistensi Pemerintah

Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nuraini Ismail, et.al (2021), Astika Rahmawati, et.al (2018), Ivan Budisaputra Agustiawan (2020), Restika Eklesia Mene, et.al (2018), Harnoni (2016), Siska Marini Pilander, et.al (2018), Yulis Widayanti (2019), Ismi Desintha Putri, et.al (2017), Siti Chodijah dan Nurul Hidayah (2018), Ni Luh Wayan Tiya Lestari dan Ni Nyoman Sri Rahayu Trisna Dewi (2020), Mutia Ulfa (2018) dan Faesal Fazlurahman, et.al (2021). Pengendalian intern (internal control) adalah rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi, dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern merupakan suatu sistem yang dibuat untuk memberi jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang dalam organisasi. Sebagaimana ditemukan oleh Yulis Widayanti (2019) menyatakan bahwa semakin tinggi sistem pengendalian internnya maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Ivan Budisaputra Agustiawan (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem pengendalian intern pemerintah yang efektif akan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Tidak adanya kekeliruan dan penyimpangan

menjadikan informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan.

Jika berbicara mengenai hasil tabulasi jawaban responden pada Badan Pengelola Keuangan dan Daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju terhadap pengendalian intern telah diimplementasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Para responden juga mayoritas setuju terhadap pernyataan mengenai adanya penerapan penentuan batas dan penentuan toleransi. Para responden juga mayoritas mengakui bahwa setiap transaksi dan aktivitas telah didukung dengan otorisasi dan bukti-bukti yang memadai. Adapun mengenai penerapan sanksi dan efek jera, para responden mayoritas menyatakan bahwa telah menerapkan sanksi dan menanamkan efek jera terhadap oknum yang melakukan penyimpangan dan kecurangan. Responden mayoritas menyetujui bahwa dalam pembagian/pemisahan tugas telah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 1 yang menyatakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.2 Uji Statistik F (Simultan)

Berdasarkan tabel 5.22 menunjukkan bahwa nilai F hitung seluruh variabel independent sebesar 23,471 dan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Adapun kriteria dalam uji simultan ini ialah ketika seluruh variabel independent memiliki nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05.

F tabel pada penelitian ini ialah sebesar 2,79. Hal ini menunjukkan bahwa F hitung $>$ F tabel ($23,471 > 2,79$) dan nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern secara simultan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Ketiga variabel ini akan sangat efektif bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada tahun-tahun kedepannya. Dengan meningkatkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern secara bersama-sama maka bukan tidak mungkin kualitas laporan keuangan akan ikut meningkat.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 2 yang menyatakan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan secara bersama-sama (Simultan) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

5.2.3 Variabel Dominan

Berdasarkan kolom standardized coefficients beta pada tabel 5.21 dapat ditemukan variabel yang paling berpengaruh dominan diantara variabel independent lainnya. Berdasarkan kolom standardized coefficients beta tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

memiliki nilai sebesar 0,333, variabel pemanfaatan teknologi sebesar 0,264 dan variabel pengendalian intern sebesar 0,388. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern merupakan variabel paling dominan yang memiliki pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan sebesar 38,8%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh yang sangat vital dalam sebuah kualitas laporan keuangan. Pengendalian intern yang berkualitas ialah pengendalian intern yang telah memiliki pengendalian yang baik dan terarah. Tanpa suatu pengendalian intern yang berkualitas maka sistem informasi pengelolaan keuangan daerah maupun pemanfaatan teknologi tidak akan terarah dan tertata dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat terkait Laporan Keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan opini Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bahwa laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 7 tahun berturut-turut.

Berdasarkan hasil ini sehingga hipotesis 3 yang menyatakan variabel pengendalian intern berpengaruh dominan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, **diterima**.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini menguji 3 (tiga) hipotesis dengan menggunakan Multiple Regression dengan alat bantu Statistical Package for the Social Science (SPSS), dimana penelitian dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
2. Secara simultan variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat.
3. Pengendalian intern menjadi variabel yang paling dominan dibandingkan dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa komitmen pengendalian intern yang baik dan terarah menjadi inti dari kualitas laporan keuangan dalam satu periode.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, secara terperinci dapat dikemukakan saran-saran, baik untuk pengembangan

pengetahuan maupun untuk kepentingan praktis. Adapun saran-saran penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemerintah
 - a. Untuk kemajuan bersama, khususnya Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat dalam penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) agar disesuaikan dengan kebutuhan instansi daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
 - b. Diharapkan agar lebih memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat pendukung kesuksesan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil laporan keuangan.
 - c. Untuk setiap transaksi dan aktivitas seharusnya didukung dengan otorisasi dan bukti-bukti yang memadai.
2. Bagi Peneliti selanjutnya
 - a. Meskipun dalam pengendalian persepsi dan pemahaman orang lain tidaklah mudah, sebaiknya peneliti selanjutnya mampu secara umum menjelaskan secara terperinci dan memberikan penekanan dalam batasan dalam memilih opsi jawaban sesuai dengan keadaan dan kenyataan di lapangan.
 - b. Untuk menemukan keakuratan data penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meluaskan objek penelitian, tidak hanya pada satu instansi dengan rentan waktu yang lebih panjang.

- c. Untuk penelitian yang akan datang disarankan untuk menambahkan variabel independent lainnya selain sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan teknologi dan pengendalian intern yang tentunya dapat mempengaruhi variabel dependent kualitas laporan keuangan agar lebih melengkapi penelitian ini karena masih ada variabel-variabel independent lain diluar penelitian ini yang mungkin bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, I Cenik & Lukman, Hendro. 2016. Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta: Mitra Wacana.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT. RINEKA CIPTA
- Darmayani, Made Ayu. 2014. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Pengendalian Internal Terhadap Nilai Laporan Keuangan pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Buleleng. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 1
- Departemen Agama RI. 2002. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: Duta Ilmu
- Ghozali. 2015. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kementerian Dalam Negeri. Petunjuk Pelaksanaan SIPKD. 2010. Jakarta: t.p.
- Krismiaji. 2015. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mauludi, Ali. 2014. Akuntansi Syariah: Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. Iqtishadia, Vol. 1, No. 1
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- Pradono, Febrian Cahyo. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan. Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Vol 22 No. 2
- Putri, Ismi Deshinta. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulai Standar Akuntansi Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Manajemen, Vol.4 No. 2.

- Sari, Yulia Ratna. 2018. Pengaruh Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. JOM FEB, Vol. 1 No. 1
- Setyowati, Lilis. 2016. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Lapran Keuangan Pemerintah Dearah Kota Semarang. Kinerja, vol 20, No. 2
- Siregar, Sofyan. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perhitungan Manual dan SPSS. Jakarta: Kencana
- Subagyo, Rokhmat. 2017. Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Alim's Publishing
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA
- _____. 2016. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: ALFABETA, CV
- _____. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: ALFABETA CV
- Sujarweni, W. Wiratna. 2015. Sistem Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sujianto, Agus Eko. 2009. Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Susilowati, Lantip. 2015. Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa dan Dagang. Yogyakarta: Kalimedia
- TM Books. 2017. Sistem Informasi Akuntansi. Yogyakarta: ANDI
- Umar, Huesin. 2014. Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Rajawali Pers
- Widarjono, Agus. 2015. Analisis Statistika multivariate terapan: dengan program spss, amos dan smartpls. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Yani. 2015. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo
- Yusup, Maulana. 2016. Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Entrepreneurship, Vol. 10 No. 2.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

KUESIONER PENELITIAN

Mamuju, 2021

Hal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Yth : Bapak/Ibu Responden
Di _ Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan tesis yang berjudul : **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Wahid

NPM : 2019MM12233

Program Studi : Magister Manajemen Keuangan Daerah

Alamat : BTN Zarindah Mamuju

Mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu dan Saudara/I sekalian untuk menjadi Responden dan mengisi kuesioner ini sebagai data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian. Atas kesediaan dan kerjasamanya, saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Peneliti,

Abdul Wahid
2019MM12233

1. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) (X1)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) menjamin keamanan data laporan keuangan pemerintah daerah.					
2	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) membantu mempercepat pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.					
3	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah.					
4	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) meningkatkan kualitas output laporan keuangan pemerintah daerah.					
5	Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) telah sesuai dengan kebutuhan instansi daerah dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.					

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.					
2	Teknologi informasi merupakan alat pendukung kesuksesan pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dengan mempermudah dan mempercepat serta menciptakan keakuratan hasil laporan keuangan.					
3	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi didukung ketersediaan <i>hardware</i> dan <i>software</i> yang mutakhir.					
4	Pemanfaatan Teknologi informasi membuka peluang untuk mengkases, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan secara cepat dan akurat.					
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan akurat.					

3. Pengendalian Intern (X3)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Pengendalian intern telah diimplementasi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan.					
2	Adanya pemisahan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.					
3	Setiap transaksi dan aktivitas telah didukung dengan otorisasi dan bukti-bukti yang memadai.					
4	menerapkan sanksi dan menanamkan efek jera terhadap oknum yang melakukan penyimpangan dan kecurangan.					
5	Penerapan adanya penentuan batas dan penentuan toleransi.					

4. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

No	Pernyataan	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1	Informasi keuangan yang disajikan oleh Instansi atau lembaga dapat dipahami oleh pengguna.					
2	Laporan Keuangan yang dihasilkan memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu dan telah disajikan secara lengkap dan tepat waktu.					
3	Transaksi yang disajikan tergambar dengan jujur dalam laporan keuangan, bebas dari kesalahan yang bersifat material.					
4	Informasi keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					
5	Masyarakat mudah untuk mendapatkan informasi keuangan di pemerintah daerah.					

Lampiran 2
TABULASI DATA

Daftar Responden

No	JK	Usia	Pangkat / Golongan	MK	Pendidikan
1	L	49 Tahun	Pembina Utama Muda / IV.c	28 Tahun	S2
2	L	49 Tahun	Pembina Tk.I / IV.b	27 Tahun	S2
3	L	41 Tahun	Penata / III.c	12 Tahun	S1
4	P	41 Tahun	Penata Tk.I / III.d	15 Tahun	S2
5	L	37 Tahun	Penata / III.c	15 Tahun	S1
6	L	40 Tahun	Penata Tk.I / III.d	12 Tahun	S2
7	L	50 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S1
8	L	45 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
9	P	36 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S1
10	L	40 Tahun	Pembina / IV.a	13 Tahun	S2
11	P	53 Tahun	Pembina / IV.a	19 Tahun	S2
12	L	50 Tahun	Penata Tk.I / III.d	24 Tahun	S1
13	L	44 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S2
14	L	52 Tahun	Pembina Tk.I / IV.b	20 Tahun	S2
15	P	44 Tahun	Penata Tk.I / III.d	10 Tahun	S2
16	L	29 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	6 Tahun	S1
17	L	37 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S1
18	L	56 Tahun	Pembina Tk.I / IV.b	28 Tahun	S2
19	P	42 Tahun	Penata / III.c	18 Tahun	S2
20	L	44 Tahun	Penata / III.c	13 Tahun	S2
21	L	28 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	6 Tahun	S1
22	P	44 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
23	P	33 Tahun	Penata Muda Tk.I / III.b	6 Tahun	S1
24	P	45 Tahun	Penata Muda / III.a	10 Tahun	S1
25	L	39 Tahun	Penata Muda / III.a	10 Tahun	S1
26	L	38 Tahun	Penata Muda / III.a	10 Tahun	S1

27	P	40 Tahun	Pengatur / II.c	11 Tahun	SMA/SMK
28	P	39 Tahun	Pengatur / II.c	10 Tahun	SMA/SMK
29	L	49 Tahun	Pembina / IV.a	21 Tahun	S1
30	P	40 Tahun	Penata / III.c	15 Tahun	S1
31	L	38 Tahun	Penata / III.c	12 Tahun	S1
32	L	42 Tahun	Penata Tk.I / III.d	18 Tahun	S2
33	P	37 Tahun	Penata Tk.I / III.d	18 Tahun	S2
34	P	37 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S2
35	P	47 Tahun	Penata Muda Tk. I / III.b	11 Tahun	S1
36	P	46 Tahun	Penata Muda Tk. I / III.b	11 Tahun	S1
37	P	42 Tahun	Penata Muda Tk. I / III.b	11 Tahun	S2
38	L	36 Tahun	Pengatur / II.c	10 Tahun	SMA/SMK
39	P	44 Tahun	Penata Muda / III.a	11 Tahun	S1
40	L	35 Tahun	Penata Muda / III.a	11 Tahun	S1
41	P	35 Tahun	Pengatur Muda / II.a	7 Tahun	SMA/SMK
42	L	43 Tahun	Pembina Tk.I / IV.b	22 Tahun	S2
43	L	42 Tahun	Penata Tk.I / III.d	13 Tahun	S2
44	P	41 Tahun	Penata Tk.I / III.d	14 Tahun	S2
45	P	36 Tahun	Penata / III.c	10 Tahun	S2
46	L	37 Tahun	Penata / III.c	11 Tahun	S1
47	L	41 Tahun	Penata Muda Tk. I / III.b	15 Tahun	Diploma
48	L	39 Tahun	Penata Muda Tk. I / III.b	16 Tahun	S1
49	P	31 Tahun	Penata Muda Tk. I / III.b	10 Tahun	S1
50	L	34 Tahun	Penata Muda / III.a	11 Tahun	Diploma
51	P	35 Tahun	Penata Muda / III.a	10 Tahun	Diploma
52	L	51 Tahun	Penata Muda / III.a	11 Tahun	S1
53	P	29 Tahun	Penata Muda / III.a	2 Tahun	S1
54	L	36 Tahun	Penata Muda / III.a	7 Tahun	S1

Jawaban Responden terhadap Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan

Daerah

No	Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)					
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1
1	4	4	4	4	2	18
2	2	4	4	4	2	16
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	3	3	2	16
5	4	4	4	3	2	17
6	4	4	5	5	4	22
7	4	4	4	4	2	18
8	4	4	4	3	2	17
9	3	4	4	4	2	17
10	2	4	4	4	2	16
11	2	2	1	1	1	7
12	1	2	1	2	4	10
13	3	3	3	3	4	16
14	1	1	2	2	1	7
15	4	3	4	4	2	17
16	4	4	4	4	2	18
17	2	4	4	4	2	16
18	3	3	3	3	3	15
19	4	4	4	2	4	18
20	3	3	4	3	3	16
21	1	1	1	1	2	6
22	3	3	3	3	4	16
23	3	3	3	3	2	14
24	3	3	3	3	4	16
25	3	3	5	3	2	16
26	4	4	4	4	3	19
27	2	4	4	4	3	17
28	3	3	4	3	3	16
29	4	4	4	4	4	20
30	4	4	3	4	2	17
31	4	3	4	4	4	19

32	3	4	4	4	4	19
33	4	3	4	4	2	17
34	5	4	3	3	4	19
35	4	4	4	4	4	20
36	3	4	4	4	4	19
37	4	3	4	4	4	19
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	1	17
40	2	4	4	4	4	18
41	4	4	3	4	4	19
42	4	3	4	4	4	19
43	3	4	3	5	4	19
44	4	4	4	4	4	20
45	4	3	4	4	4	19
46	3	3	3	4	3	16
47	4	4	3	4	2	17
48	4	4	4	4	2	18
49	2	4	4	4	2	16
50	4	4	4	4	4	20
51	3	4	3	4	3	17
52	3	4	3	3	4	17
53	4	4	4	4	2	18
54	3	3	3	3	3	15

Jawaban Responden terhadap Pemanfaatan Teknologi

No	Pemanfaatan Teknologi (X2)					
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2
1	3	3	2	2	2	12
2	4	5	5	4	4	22
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	3	2	3	14
5	3	2	3	4	2	14
6	4	4	4	3	3	18
7	4	5	5	4	4	22
8	3	1	3	3	3	13
9	4	2	2	4	2	14
10	4	4	3	4	4	19
11	1	5	4	2	2	14
12	2	1	4	2	1	10
13	3	3	3	3	3	15
14	1	4	2	2	1	10
15	4	2	2	4	2	14
16	4	2	4	4	2	16
17	3	2	2	3	3	13
18	2	3	3	3	1	12
19	2	4	3	3	3	15
20	3	2	3	3	3	14
21	2	1	2	2	4	11
22	2	2	4	4	2	14
23	4	2	1	4	4	15
24	4	1	2	4	4	15
25	3	3	3	3	2	14
26	2	3	3	4	4	16
27	4	4	4	4	4	20
28	4	3	3	2	2	14
29	4	4	4	4	4	20
30	4	1	2	4	4	15
31	4	3	3	2	3	15
32	1	5	2	4	4	16
33	5	3	4	1	3	16

34	5	3	4	4	3	19
35	4	5	5	4	4	22
36	3	3	2	3	2	13
37	4	3	4	4	4	19
38	4	4	4	4	4	20
39	2	2	3	3	3	13
40	4	4	4	4	3	19
41	4	4	3	4	4	19
42	3	1	3	3	2	12
43	4	3	4	4	4	19
44	3	4	4	4	4	19
45	2	2	3	3	3	13
46	4	4	4	2	4	18
47	3	3	3	3	3	15
48	4	4	3	4	4	19
49	3	4	4	3	4	18
50	3	4	4	3	4	18
51	3	4	4	3	4	18
52	5	3	2	4	5	19
53	4	4	4	3	3	18
54	4	4	4	4	4	20

Jawaban Responden terhadap Pengendalian Intern

No	Pengendalian Intern (X3)					
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3
1	2	4	4	3	2	15
2	3	4	4	4	4	19
3	2	2	4	2	2	12
4	4	4	4	4	4	20
5	2	4	4	2	4	16
6	3	4	4	4	4	19
7	5	4	4	4	4	21
8	4	4	4	4	4	20
9	2	4	4	2	2	14
10	4	3	4	4	4	19
11	2	1	1	1	4	9
12	1	4	1	2	1	9
13	3	3	4	2	2	14
14	1	1	1	2	4	9
15	3	2	4	2	2	13
16	3	4	4	4	4	19
17	4	4	4	4	4	20
18	4	4	4	4	4	20
19	2	2	1	4	4	13
20	2	4	4	4	2	16
21	1	4	1	4	1	11
22	2	4	4	4	4	18
23	3	2	4	4	2	15
24	2	4	4	4	2	16
25	1	3	1	4	3	12
26	4	4	4	4	3	19
27	3	4	4	4	4	19
28	2	2	3	4	3	14
29	4	4	4	4	4	20
30	2	2	4	2	4	14
31	2	4	2	2	2	12
32	1	1	1	4	3	10
33	2	2	2	4	4	14

34	2	4	2	4	2	14
35	4	4	2	2	4	16
36	4	4	2	3	2	15
37	4	2	2	2	2	12
38	4	4	3	4	4	19
39	4	2	1	1	4	12
40	4	2	2	2	4	14
41	4	4	2	2	4	16
42	4	4	2	2	4	16
43	4	2	2	2	4	14
44	4	2	2	2	2	12
45	4	1	1	1	1	8
46	4	2	2	2	4	14
47	4	2	2	2	2	12
48	4	2	2	2	4	14
49	4	4	3	4	4	19
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	3	4	3	18
52	4	2	2	3	2	13
53	4	3	2	4	2	15
54	4	4	4	4	4	20

Jawaban Responden terhadap Kualitas Laporan Keuangan

No	Kualitas Laporan Keuangan (Y)					
	Y.1	Y.2	Y.4	Y.4	Y.5	Y
1	4	2	4	4	4	18
2	5	4	4	4	4	21
3	4	4	4	4	4	20
4	5	2	3	3	3	16
5	1	2	3	3	3	12
6	4	4	2	4	4	18
7	4	4	2	4	4	18
8	4	3	4	3	3	17
9	2	4	4	4	2	16
10	4	4	4	4	4	20
11	2	1	2	2	1	8
12	2	1	1	1	1	6
13	3	2	2	2	2	11
14	1	4	1	2	2	10
15	1	1	3	3	3	11
16	4	2	4	2	4	16
17	2	4	3	3	2	14
18	2	3	3	3	3	14
19	4	2	2	2	2	12
20	4	3	3	2	2	14
21	1	1	2	2	1	7
22	4	2	4	4	4	18
23	1	4	3	3	3	14
24	1	4	3	3	3	14
25	1	4	3	3	3	14
26	3	2	4	4	4	17
27	4	4	4	4	4	20
28	2	4	3	3	3	15
29	4	4	4	4	4	20
30	4	2	4	4	4	18
31	4	3	3	2	2	14
32	1	4	3	3	3	14
33	4	1	2	2	2	11

34	4	1	2	2	2	11
35	4	2	4	4	4	18
36	3	4	2	3	3	15
37	3	2	2	2	2	11
38	3	3	3	4	4	17
39	1	1	4	4	4	14
40	4	3	4	3	3	17
41	4	2	3	3	3	15
42	4	2	3	3	3	15
43	4	2	3	3	3	15
44	4	2	4	4	4	18
45	1	2	5	5	3	16
46	3	3	3	3	3	15
47	2	4	4	4	2	16
48	2	4	4	4	2	16
49	4	4	4	4	4	20
50	4	4	4	4	4	20
51	4	4	4	4	4	20
52	4	2	3	3	3	15
53	4	4	3	4	4	19
54	2	2	4	4	4	16

Lampiran 3

OUTPUT SPSS VERSI 25

1. DESKRIPSI RESPONDEN

		Jenis Kelamin			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Laki-Laki	31	57,4	57,4	57,4
	Perempuan	23	42,6	42,6	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

		Tingkat Pendidikan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Magister (Strata2)	20	37,0	37,0	37,0
	Sarjana (Strata1)	27	50,0	50,0	87,0
	Diploma (D3)	3	5,6	5,6	92,6
	SMA/SMK	4	7,4	7,4	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

		Golongan			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	Gol IV	8	14,8	14,8	14,8
	Gol III	42	77,8	77,8	92,6
	Gol II	4	7,4	7,4	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

		Masa Kerja			Cumulative
		Frequency	Percent	Valid Percent	Percent
Valid	1 – 5 Tahun	1	1,9	1,9	1,9
	6 – 10 Tahun	18	33,3	33,3	35,2
	11 – 15 Tahun	23	42,6	42,6	77,8
	16 – 20 Tahun	6	11,1	11,1	88,9
	> 21 Tahun	6	11,1	11,1	100,0
	Total	54	100,0	100,0	

2. ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	54	6	22	16,87	3,145
Pemanfaatan Teknologi	54	10	22	16,15	3,147
Pengendalian Intern	54	8	21	15,26	3,481
Kualitas Laporan Keuangan	54	6	21	15,31	3,458
Valid N (listwise)	54				

3. UJI INSTRUMEN PENELITIAN

a. Uji Validitas

Uji Validitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	Total X1
X1.1	Pearson Correlation	1	,539**	,514**	,453**	,219	,747**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,001	,112	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.2	Pearson Correlation	,539**	1	,646**	,695**	,163	,802**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,239	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.3	Pearson Correlation	,514**	,646**	1	,698**	,125	,793**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,367	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.4	Pearson Correlation	,453**	,695**	,698**	1	,220	,815**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,000		,111	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X1.5	Pearson Correlation	,219	,163	,125	,220	1	,517**
	Sig. (2-tailed)	,112	,239	,367	,111		,000
	N	54	54	54	54	54	54
Total X1	Pearson Correlation	,747**	,802**	,793**	,815**	,517**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	Total X2
X2.1	Pearson Correlation	1	,068	,221	,327*	,419**	,616**
	Sig. (2-tailed)		,627	,108	,016	,002	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.2	Pearson Correlation	,068	1	,523**	,124	,337*	,678**
	Sig. (2-tailed)	,627		,000	,371	,013	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.3	Pearson Correlation	,221	,523**	1	,097	,185	,635**
	Sig. (2-tailed)	,108	,000		,484	,181	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.4	Pearson Correlation	,327*	,124	,097	1	,439**	,571**
	Sig. (2-tailed)	,016	,371	,484		,001	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X2.5	Pearson Correlation	,419**	,337*	,185	,439**	1	,730**
	Sig. (2-tailed)	,002	,013	,181	,001		,000
	N	54	54	54	54	54	54
Total X2	Pearson Correlation	,616**	,678**	,635**	,571**	,730**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Pengendalian Intern

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total X3
X3.1	Pearson Correlation	1	,134	,198	-,022	,302*	,509**
	Sig. (2-tailed)		,333	,151	,874	,027	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X3.2	Pearson Correlation	,134	1	,514**	,488**	,104	,708**
	Sig. (2-tailed)	,333		,000	,000	,456	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X3.3	Pearson Correlation	,198	,514**	1	,427**	,204	,755**
	Sig. (2-tailed)	,151	,000		,001	,140	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X3.4	Pearson Correlation	-,022	,488**	,427**	1	,179	,648**
	Sig. (2-tailed)	,874	,000	,001		,196	,000
	N	54	54	54	54	54	54
X3.5	Pearson Correlation	,302*	,104	,204	,179	1	,549**
	Sig. (2-tailed)	,027	,456	,140	,196		,000
	N	54	54	54	54	54	54
Total X3	Pearson Correlation	,509**	,708**	,755**	,648**	,549**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Validitas Kualitas Laporan Keuangan

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Total Y
Y.1	Pearson Correlation	1	,018	,179	,132	,389**	,552**
	Sig. (2-tailed)		,895	,196	,343	,004	,000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.2	Pearson Correlation	,018	1	,206	,396**	,286*	,558**
	Sig. (2-tailed)	,895		,136	,003	,036	,000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.3	Pearson Correlation	,179	,206	1	,756**	,608**	,740**
	Sig. (2-tailed)	,196	,136		,000	,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.4	Pearson Correlation	,132	,396**	,756**	1	,746**	,819**
	Sig. (2-tailed)	,343	,003	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54	54	54
Y.5	Pearson Correlation	,389**	,286*	,608**	,746**	1	,843**
	Sig. (2-tailed)	,004	,036	,000	,000		,000
	N	54	54	54	54	54	54
Total Y	Pearson Correlation	,552**	,558**	,740**	,819**	,843**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54	54	54

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,768	5

Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,650	5

Uji Reliabilitas Pengendalian Intern

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,631	5

Uji Reliabilitas Kualitas Laporan Keuangan

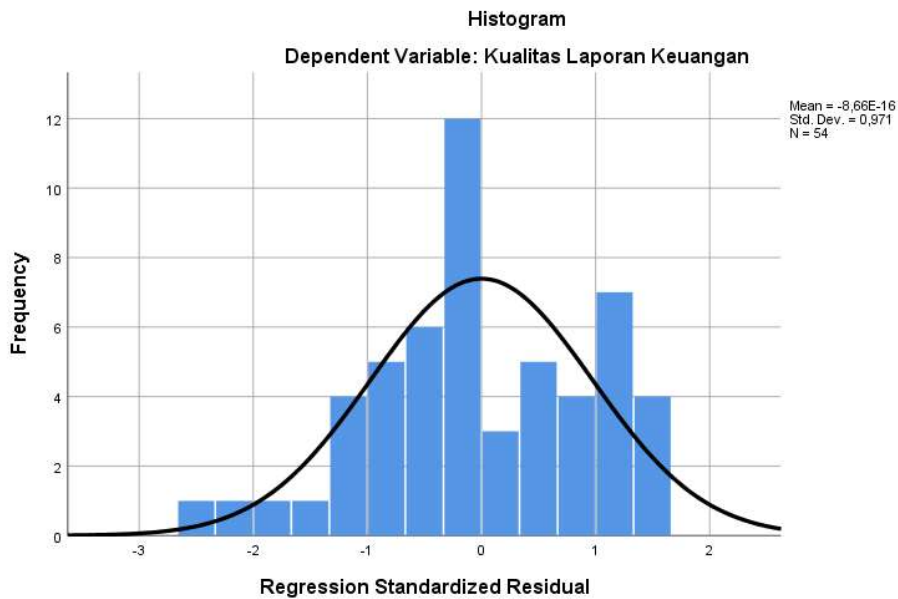
Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,705	5

4. UJI ASUMSI KLASIK

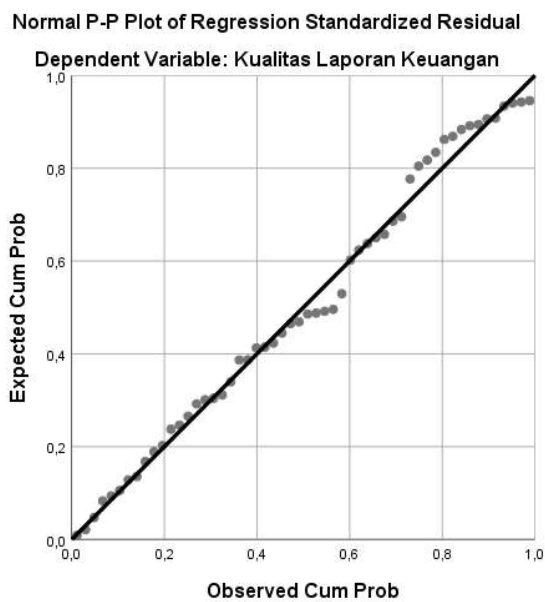
a. Uji Normalitas

1) Analisis Grafik

Grafik histogram Uji Normalitas



Normal Probability Plot



2) Uji Statistik

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22809879
Most Extreme Differences	Absolute	,078
	Positive	,078
	Negative	-,073
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

b. Uji Multikolinieritas

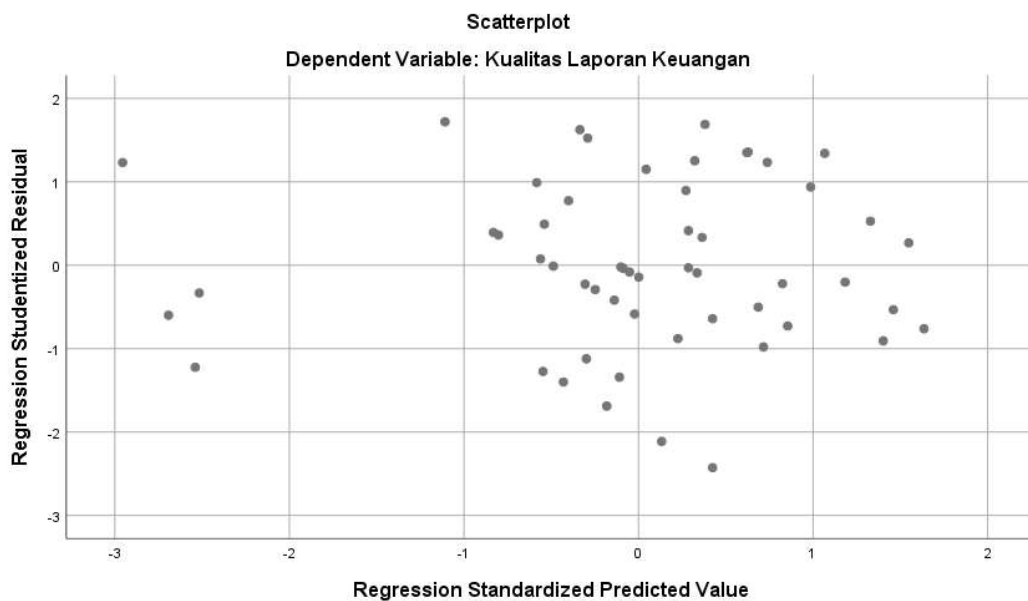
Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-1,434	2,040		-,703	,485		
1 Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	,367	,119	,333	3,076	,003	,707	1,414
Pemanfaatan Teknologi	,290	,121	,264	2,395	,020	,684	1,462
Pengendalian Intern	,386	,099	,388	3,895	,000	,836	1,196

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

c. Uji Heteroskedastisitas

1) Analisis Grafik

Grafik Scatterplot



2) Uji Statistik

Uji Gelsjer

Model	Coefficients ^a			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,758	1,169		1,504	,139
1 Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	,013	,068	,032	,197	,845
Pemanfaatan Teknologi	,060	,069	,144	,859	,394
Pengendalian Intern	-,076	,057	-,203	-1,338	,187

a. Dependent Variable: Abs_Res

5. ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA

a. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,765 ^a	,585	,560	2,294

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pemanfaatan Teknologi

b. Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji Parsial T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1,434	2,040		-,703	,485
	Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	,367	,119	,333	3,076	,003
	Pemanfaatan Teknologi	,290	,121	,264	2,395	,020
	Pengendalian Intern	,386	,099	,388	3,895	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

c. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	370,534	3	123,511	23,471	,000 ^b
	Residual	263,114	50	5,262		
	Total	633,648	53			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

b. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Sitem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), Pemanfaatan Teknologi

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdul Wahid
Tempat / Tanggal Lahir : Ta'juncu / 31 Desember 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Telepon / HP : 085398238963
Email : wahid.abdol77@gmail.com
Status Perkawinan : Kawin
Alamat Rumah : a. Jalan : BTN Zarindah Blok EE 8
b. Kelurahan / Desa : Simboro
c. Kecamatan : Simboro
d. Kabupaten / Kota : Mamuju
e. Provinsi : Sulawesi Barat
Kegemaran (Hobby) : Olah Raga (Badminton)
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Riwayat Pekerjaan : a. Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2011 s/d 2016
b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dari Tahun 2017 sampai sekarang
Riwayat Pendidikan : a. SD Negeri No.79 Enrekeng Tahun 1990
b. SMP Negeri Ta'juncu Tahun 1993
c. SMEA Muhammadiyah Watang Soppeng Tahun 1996
d. STIKS Tamalanrea Makassar Tahun 2010

Makassar, 2021
Yang membuat,

Abdul Wahid
2019MM12233